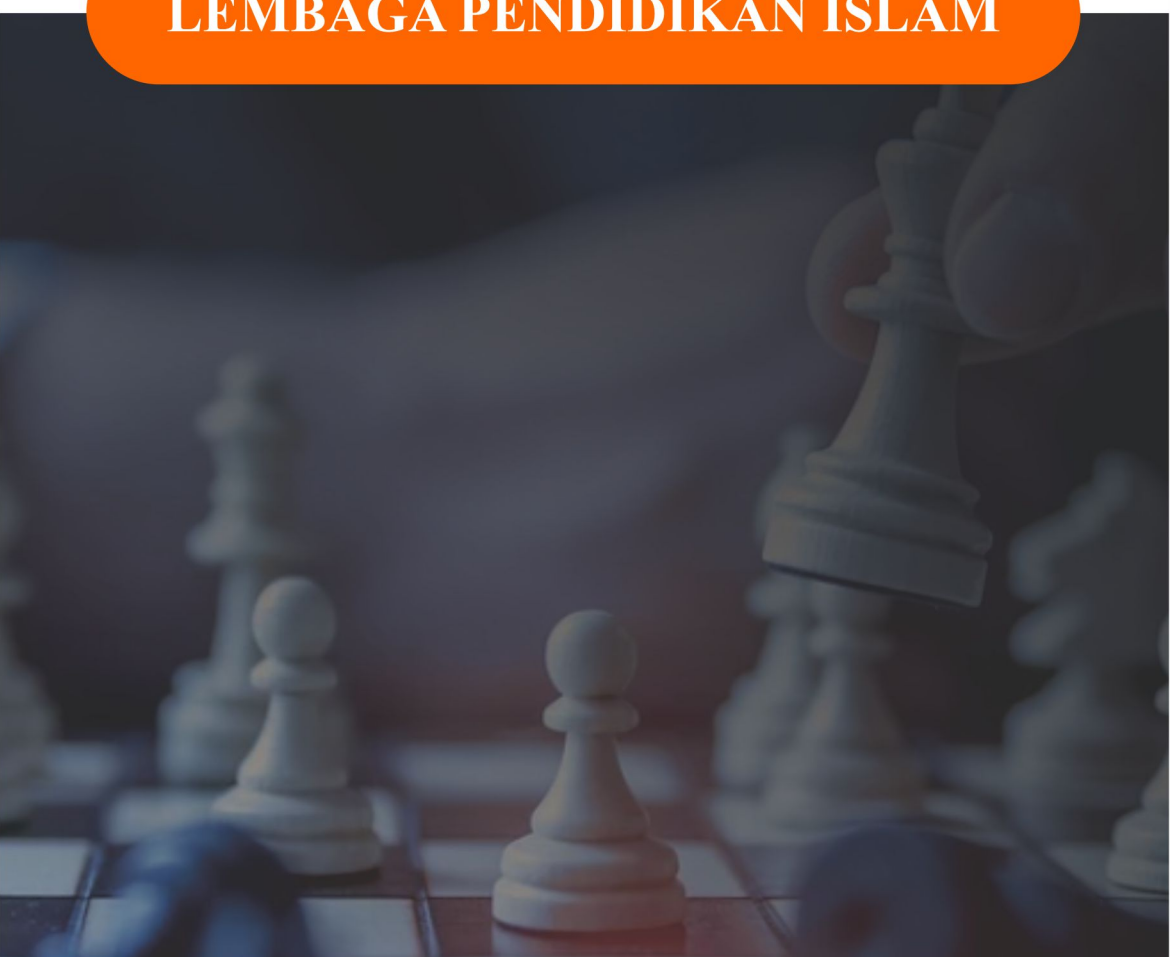


Subiyantoro



IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM



**IMPLEMENTASI
MANAJEMEN MUTU TERPADU
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

Penyusun:

Subiyantoro – Shofiatul Afifah – Widia Ningsi Simanjuntak
Hamidatun Nisa Tambak – Aditya Henda Ramadhan –
Zakiyya Labiba

**IMPLEMENTASI
MANAJEMEN MUTU TERPADU
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

Penulis:

**Subiyantoro – Shofiatul Afifah – Widia Ningsi
Simanjuntak - Hamidatun Nisa Tambak – Aditya Henda
Ramadhan – Zakiyya Labiba**

Desain Cover:

Kholifshd

Tata Letak:

Subiyantoro

ISBN:

ISBN: 978-623-6095-14-0

Cetakan Pertama:

November 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Copyright © 2021

All Right Reserved

Diterbitkan oleh

Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto,
Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Lembaga Pendidikan Islam” ini. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan bagi seluruh umat manusia.

Buku ini ditulis dengan harapan dapat membantu para mahasiswa dalam belajar manajemen mutu pendidikan, berguna bagi pengelolaan organisasi pendidikan, maupun para praktisi pendidikan untuk mendalami konsep mengenai implementasi manajemen mutu terpadu lembaga pendidikan Islam. Seberapa besar pencapaian mutu sebuah lembaga pendidikan tergantung pada proses manajerial serta sumber daya yang ada di dalamnya.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan mungkin masih banyak ditemukan berbagai kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan melalui para pembaca yang Budiman. Akhir kata penulis sangat bersyukur telah diberi kesempatan untuk memberi sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan melalui karya buku ini. Kepada seluruh pihak yang terlibat penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kontribusinya selama proses penulisan buku. Semoga bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
BAB II DIMENSI SERTA TAHAPAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN	
A. Dimensi Mutu	5
B. Tahapan Implementasi Mutu Berbasis Sosiologi Pendidikan.....	9
C. Tahapan Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu Berbasis Sosiologi Pendidikan.....	16
D. Indikator Keberhasilan Implementasi Total Quality Management Pada Lembaga Pendidikan Islam.....	22
BAB III PRINSIP, KOMPONEN DAN KEEFEKTIFAN MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN	
A. Prinsip dan Komponen Manajemen Mutu Terpadu	42
B. Manajemen Mutu Terpadu Perspektif Sosiologi Pendidikan.....	48
C. Efektifitas Manajemen Mutu Terpadu dalam	

Lembaga Pendidikan Islam	51
--------------------------------	----

BAB IV “IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN” (MMTP) “PADA LEMBAGA PENDIDIKAN” PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Langkah-Langkah dan Faktor Sukses Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan.....	56
B. Assesmen Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan	58
C. Manajemen Mutu Pendidikan dalam Sosiologi Pendidikan.....	60

BAB V BUDAYA ORGANISASI DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

A. Konsep Budaya Organisasi.....	64
B. Implementasi membangun Budaya organisasi Perspektif Sosiologis	75

BAB VI QUALITY ASSURANCE (QA) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Konsep Quality Assurance (QA) atau Penjaminan Mutu	83
B. Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia	88
C. Quality Assurance di Lembaga Pendidikan Perspektif Sosiologi Pendidikan	95

BAB VII PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Konsep Manajemen Mutu Terpadu.....	99
---------------------------------------	----

B. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pendidikan	101
C. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan	106

BAB VIII ANALISA IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU LEMBAGA PENDIDIDIKAN ISLAM

A. Dimensi Serta Tahapan Implementasi Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Sosiologi Pendidikan	109
B. Prinsip, Komponen Dan Keefektifan Manajemen Mutu Terpadu Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Sosiologi Pendidikan	110
C. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan” (MMTP) “Pada Lembaga Pendidikan” Perspektif Sosiologi Pendidikan	111
D. Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan	112
E. Quality Assurance (QA) Di Lembaga Pendidikan.....	114
F. Penyelenggaraan Dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan.....	114

BAB IX PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Kata Penutup	117

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

CV RINGKAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan suatu sistem pendidikan tertentu, selalu melibatkan proses pendidikan itu sendiri, dan ketika suatu proses pendidikan berjalan, tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dipenuhi, begitu juga dalam penerapan sistem manajemen mutu pendidikan. Tahapan-tahapan dalam manajemen mutu ini menjadi faktor penting dari kegagalan atau keberhasilan dari penerapan manajemen mutu pendidikan. Penerapan suatu manajemen mutu yang diuji-coba atau bahkan yang sudah diimplementasikan oleh suatu lembaga pendidikan diharapkan dapat mengantarkan lembaga tersebut menjadi lebih berkualitas.

Lembaga Pendidikan Islam sudah seharusnya menjadikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang sangat menaruh perhatian terhadap sebuah mutu atau kualitas sehingga bisa mengantarkan pada pencapaian kepada tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan Islam perlu memperhatikan terhadap pengembangan manajemen mutu bahkan apabila terdapat sebuah sistem manajemen mutu yang dapat berkontribusi terhadap capaian-capaian positif, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsinya.

Melalui tulisan-tulisan pada bab berikut, diupayakan berusaha untuk mengeksplorasi beberapa tahapan penerapan suatu manajemen mutu dalam konstekstualisasinya pada lembaga

pendidikan Islam. Disadari atau tidak, pendidikan Islam sejauh ini sering dipandang oleh masyarakat dengan sebelah mata. Faktornya bisa jadi lantaran secara umum kualitas pendidikan Islam yang masih dianggap belum mampu bersaing, walau sekalipun telah mengadopsi berbagai konsep manajemen modern. Anggapan tersebut tidak lepas dari subyektifitas dari perspektif masyarakat itu sendiri, karena dalam kenyataannya banyak dari lembaga pendidikan Islam yang sudah menjadi pilihan masyarakat

Ada hal penting yang bisa dikoreksi dari penerapan manajemen mutu selama ini karena boleh jadi kegagalan dalam menyuguhkan kualitas mutu pendidikannya barangkali diperantarai oleh tahapan pelaksanaannya yang tidak terorganisir dengan baik. Dengan demikian, tulisan ini mencoba secara khusus mengeksplorasi tentang tahapan penerapan suatu manajemen dalam pendidikan perspektif sosiologi pendidikan. Kajian ini meliputi : Prinsip dan Komponen yang perlu diperhatikan, efektifitas Manajemen Terpadu dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif dan bagaimana kaitannya dengan Sosiologi pendidikan; Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (MMTP) Pada Lembaga Pendidikan Perspektif Sosiologi Pendidikan; Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan; Quality Assurance (QA) pada lembaga pendidikan Perspektif Sosiologi Pendidikan; Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pendidikan dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. Kajian ini dikaitkan dengan Sosiologi pendidikan, karena dalam

pelaksanaan pendidikan di lapangan (termasuk dalam implementasi manajemen mutu pendidikan), tidak bisa lepas dari pengelolaan manusia dalam interaksinya mencapai untuk mencapai keberhasilan bersama. Dalam hal demikian, maka sosiologi pendidikan diperlukan dalam kajian ini.

Dalam realitas di lapangan, setiap lembaga pendidikan pasti berusaha menuju ke arah pengelolaan mutu. Hal tersebut selalu dilakukan oleh para pengelola pendidikan, karena adanya kompetisi antar lembaga yang tidak bisa dihindari lagi. Masyarakat kelas menengah ke atas sampai dengan menengah ke bawah sudah sangat kritis dalam memilih lembaga pendidikan yang dipandang “nampak” mutu dalam pengelolaannya. Upaya pengelolaan mutu itu terus dilakukan dengan berbagai cara oleh para pengelola pendidikan yang dimotori oleh pimpinan puncak pada suatu lembaga tersebut.

Upaya pengelolaan mutu yang digerakkan oleh pimpinan puncak itu, biasanya dilakukan secara “mengalir” saja, atau dalam istilah teori manajemen disebut sebagai “manajemen berjalan”. Hal ini memang ada sisi positifnya, yakni pengembangan pendidikan bisa dikemas dengan berdasar kebutuhan-kebutuhan yang langsung dirasakan di lapangan. Namun hal tersebut juga muncul negatifnya, yakni langkah-langkah dalam pengembangan mutu yang dilakukannya menjadi kurang efisien; karena dalam kemasan langkahnya kadang hanya berdasar “*trial and error*”. Dengan cara itu, Ketika pengelola melakukan pengembangan

mutu pendidikan dengan menerapkan langkah mutu tertentu dan dipandang tidak efektif, maka pengelola akan menggantikannya dengan cara lain. Cara inilah yang dipandang menjadi tidak efisien.

Mengapa hal tersebut di atas terjadi, asumsinya adalah karena di lapangan para pengelola pendidikan telah disibukkan oleh urusan-urusan birokrasi dalam regulasi-regulasi yang membelenggu dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) terutama dalam menuju mutu pendidikan. Disamping masalah tersebut, juga sangat jarang para pengelola pendidikan mengaitkan dengan teori-teori sosiologi pendidikan dalam implementasinya. Padahal pelaksanaan penjaminan ke arah mutu pendidikan, tidak lepas dari (misalnya) adanya interaksi-interaksi dalam kerja tim dalam penggerakan ke arah mutu, disamping juga targetnya adalah kebutuhan sosial. Maka disinilah perlu adanya kajian yang terkait dengan masalah yang telah terurai tersebut di atas. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat dikaji dalam solusi dari rumusan masalah berikut.

B. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk-bentuk penjaminan Mutu Pendidikan dalam upaya pengembangan mutu lembaga pendidikan (utamanya lembaga pendidikan Islam)?
2. Bagaimana langkah-langkah Implementasi dalam upaya manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan (terutama lembaga pendidikan Islam)?

BAB II

DIMENSI SERTA TAHAPAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Dimensi Mutu

Mutu dapat diartikan sebagai sebuah ukuran baik buruknya suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb.), kualitas.¹ Makna dari mutu juga dapat dipahami sebagai sebuah kualitas yang secara umum bermakna sama. Mutu yang berkenaan dengan produk serta layanan, diungkapkan oleh Ikezawa bahwa mutu dan kepuasan pelanggan adalah sama.² Mutu dalam konteks pendidikan, maknanya selalu berdasarkan pada sistem pendidikan secara utuh yang dimulai dari perencanaan, proses pendidikan, evaluasi, dan hasil pendidikan. Selanjutnya mengenai dimensi mutu sendiri berfungsi untuk mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap mutu. Dimensi mutu memiliki beberapa karakteristik yang menggambarkan sebuah produk atau layanan yang bermutu. Menurut Gaspersz (1997) dimensi mutu dikelompokkan dalam delapan kategori yang meliputi:

¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 945.

² Marzuki Mahmud, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

1. Kinerja (*performance*). Kinerja mempunyai kaitan dengan aspek fungsional yang ada pada sebuah produk dan karakteristik utama yang menjadi pertimbangan para pelanggan sebelum membeli produk. Misalnya sebuah komputer yang memiliki *performance* baik artinya komputer tersebut memiliki proses yang cepat, penyimpanan yang memadai dan sebagainya. Biasanya sebuah kinerja diukur dengan adanya taraf atau tingkatan.
2. Keistimewaan (*features*). Kategori dimensi keistimewaan ini lebih mudah berubah dibanding dimensi lain, *feature-feature* dengan cepat menjadi bagian dari *performance*. Misalnya remot pada televisi dianggap sebagai *feature* pada beberapa tahun yang lalu, namun sekarang semua televisi telah memilikinya. Pemilihan sebuah *feature* ini juga dapat dianggap sebagai refleksi mutu. *Feature* sendiri telah dapat diukur sesuai dengan keragamannya (seberapa banyak) dan kekuatan daya tariknya.
3. Keandalan (*reliability*). Dimensi mutu yang termasuk dalam kategori keandalan ini berkaitan dengan kemampuan suatu produk berfungsi dengan tepat dan berhasil dalam kurun waktu tertentu serta di bawah kondisi tertentu. Keandalan adalah karakteristik yang merefleksikan kemungkinan mengenai tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk atau layanan. Misalnya untuk melihat keandalan sebuah sepeda motor adalah dengan mengukur tingkat kecepatannya.

4. Konformansi (*conformance*). Konformansi dapat diartikan sebagai kesesuaian produk terhadap spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berdasar pada kebutuhan pelanggan. Konformansi dapat menunjukkan derajat karakteristik sebuah desain produk dan operasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar kerap diekspresikan sebagai spesifikasi yang menunjukkan pusat target serta tingkat penerimaan terhadap adanya deviasi atau variasi. Efektivitas dimensi mutu konformansi dapat mengantarkan pada reliabilitas, durabilitas, performansi, dan adanya berbagai persepsi dalam sebuah mutu.
5. Daya tahan (*durability*). Daya tahan digunakan untuk mengukur kehidupan produk pada dimensi teknis dan ekonomi. Karakteristik daya tahan ini berkaitan dengan seberapa lama sebuah produk dapat digunakan sebelum ia rusak atau diganti. Sebagai contoh ketika seorang pelanggan akan membeli produk sepatu kulit karena berdasarkan daya tahan sepatu yang bagus, dengan kualitas sepatu tersebut tentu manfaat yang diperoleh selama masa penggunaan dapat lebih panjang, dengan demikian karakteristik dari kualitas produk inilah yang kemudian digunakan oleh pelanggan sebagai pertimbangan sebelum membeli sepatu.
6. Kemampuan pelayanan (*serviceability*). Kemampuan dalam pelayanan merupakan

karakteristik yang memiliki kaitan dengan kecepatan, kehormatan, kompetensi, dan kemudahan perbaikan serta penggantian. Ketika ditemukan sebuah produk rusak, perlu diketahui seberapa cepat proses pembaharuannya serta seberapa efektif usaha perbaikan yang dilakukan. Misalnya, seperti salah satu layanan internet yang mengalami gangguan pada jaringan kemudian bagaimana proses perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanannya.

7. Estetika (*aesthetics*). Estetika adalah karakteristik yang berkenaan dengan keindahan yang sifatnya subjektif serta merefleksikan preferensi seseorang. Estetika sebuah produk perlu untuk dikaitkan dengan perasaan yang dimiliki oleh individu yang meliputi karakter tertentu, misalnya perasaan, penglihatan, dan pendengaran.
8. Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*). Sebelum membeli sebuah produk, para pelanggan belum tentu memiliki informasi yang lengkap mengenai suatu produk atau layanan, biasanya pelanggan akan bergantung pada informasi tidak langsung yang disebarkan atau diiklankan oleh perusahaan atau lembaga yang memproduksi produk atau layanan tertentu. Dimensi ini mempunyai sifat subjektif, sehingga dapat berkaitan dengan perasaan pelanggan yang mengonsumsi produk untuk meningkatkan harga diri. Contohnya dapat berupa reputasi, seperti ketika seorang pelanggan akan membeli sebuah produk

elektronik yang bermerek, pelanggan memiliki persepsi dan informasi bahwa produk tersebut merupakan produk yang berkualitas, dengan memiliki produk yang bermerek tersebut tentu dapat membantu untuk meningkatkan harga diri meski pelanggan tersebut belum pernah menggunakan produk tersebut.

Delapan dimensi yang telah dipaparkan di atas meski biasanya diaplikasikan pada sebuah layanan produk fisik, namun dimensi tambahan berupa informasi merupakan unsur terpenting dalam sebuah pelayanan mutu. Bagi pelanggan, informasi yang diterima mempunyai dua aspek mendasar yang perlu diketahui yaitu ketersediaan (*availability*) dan ketetapan (*accuracy*). Ketersediaan produk yang tidak sesuai dengan informasi dapat memengaruhi kualitas dalam beberapa hal. Contoh nyata yang dapat ditemukan adalah ketika seorang pelanggan tidak mendapat informasi yang jelas pada saat bertanya kepada kasir atau sales mengenai ketersediaan sebuah produk, jika respon yang diterima pelanggan tidak memuaskan, pelanggan tersebut akan kecewa dan menyebabkan pengaruh negatif karena tidak sesuai dengan persepsi yang tercantum pada informasinya.

B. Tahapan Implementasi Mutu Berbasis Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan ilmu fundamental atau mendasar dengan fungsi sebagai bantuan untuk memecahkan berbagai persoalan pada sebuah pendidikan. Zainuddin Maliki memaparkan

secara terminologis bahwa sosiologi pendidikan merupakan sebuah kajian ilmu mengenai bagaimana sebuah institusi dan kekuatan sosial dapat memengaruhi proses serta lulusan pendidikan khususnya dalam pendidikan Islam dan sebaliknya.³ Definisi ini menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara sebuah pendidikan Islam dengan perkembangan sosial. Selanjutnya mengenai penjaminan mutu, ialah sebuah konsep yang digunakan dalam manajemen mutu pendidikan.⁴ Pengertian mutu oleh Tenner dan De Toro dalam penelitian yang ditulis oleh Connie menjelaskan bahwa mutu ialah sebuah cara untuk mengelola organisasi dengan berbagai arahan dengan sifat yang komprehensif dan terintegrasi dalam rangka: a) untuk mencukupi kepentingan pelanggan secara konsisten, dan b) untuk mencapai pengembangan secara berkesinambungan dalam setiap aspek aktivitas.

Menyitir teori W. Edward Deming dengan dikutip oleh Nanang Fattah, dijelaskan bahwa terdapat empat model sistem penjaminan mutu pendidikan yang biasa diterapkan di sekolah:

1. Perencanaan (*Plan*), perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan upaya penjaminan mutu menggunakan berbagai ketetapan bagi kebijakan mutu, prosedur mutu dan pencapaian tujuan mutu

³ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 2.

⁴ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 239.

- beserta indikator pencapaiannya.
2. Pelaksanaan (*Do*), pelaksanaan berkaitan dengan apa yang sudah dirancang dalam menjamin mutu pendidikan, mencakup seluruh prosedur dengan pelayanan administrasi pendidikan yang sinkron dengan *Standar Operating Prosedur*(SOP) yang telah ditetapkan.
 3. Evaluasi(*Check*), adalah model penjaminan mutu menggunakan metode monitoring, penyelidikan, pengukuran, dan evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan serta konsekuensi pelaksanaan yang termasuk dalam audit mutu internal.
 4. Tindakan (*Action*), yaitu kegiatan untuk melakukan pembaruan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja. Selanjutnya peningkatan standar dilaksanakan setelah adanya diskusi, sehubungan dengan pelaksanaan kinerja antara supervisor dengan guru yang akan dievaluasi.

Proses PDCA di atas dikembangkan melalui bermacam perspektif cara pengelolaan mutu, konsepnya yaitu: a) pengendalian mutu (*quality control*); b) penjaminan mutu (*quality assurance*); dan c) peningkatan mutu (*quality improvement*). Konsep pengendalian mutu dalam pendidikan adalah kegiatan untuk mendeteksi adanya produk pendidikan yang menyimpang dari standar. Pengendalian mutu biasanya lebih berorientasi pada produk, yaitu hasil belajar sebagai tujuan pendidikan maupun jasa pendidikan. *Learning outcome* atau capaian dalam pembelajaran pendidikan biasanya digambarkan

berdasarkan kelulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar sebagai acuan dalam pembuktian mutu. Perbedaan dengan rancangan penjaminan mutu, fokusnya tidak terdapat pada akhir layanan atau jasa pendidikan, tetapi proses penjaminan mutunya dilakukan pada saat kegiatan pendidikan berlangsung. Sedangkan dalam konsep peningkatan mutu merupakan kombinasi antara proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu yang diperluas dengan berbagai upaya peningkatan.

Plan, Do, Check, Action (PDCA) dalam sistem penjaminan mutu dapat juga diterjemahkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penindaklanjutan menjadi sebuah alat kontrol bagi seluruh elemen dalam menjaga mutu pendidikan Islam.⁵ Perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi dalam pendidikan Islam lebih diarahkan pada persiapan lulusan yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam. Merujuk pada Trilogi Juran, mutu pada sebuah lembaga pendidikan Islam dapat ditingkatkan dengan melangsungkan pembenahan dalam aspek perencanaan mutu/kualitas, pengendalian mutu/kualitas, serta peningkatan mutu/kualitas. Isi pokok perencanaan mutu diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap sebuah lembaga pendidikan Islam, misalnya

⁵ Mardan Umar dan Feiby Ismail, "Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan Joseph Juran)", *Jurnal Pendidikan Islam Iqra* Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017, 22-23.

melalui pesantren dan madrasah. Kualitas yang dimiliki oleh para lulusannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak mengenai banyak permasalahan yang ada di masyarakat khususnya umat Islam.

Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam memiliki tugas untuk menterjemahkan kebutuhan masyarakat pada sebuah program kegiatan, untuk kemudian menyusun langkah-langkah proses pelaksanaan program demi menghasilkan peserta didik yang bermutu dengan kualitas yang mencukupi. Tahapan pengendalian mutu dalam pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa implementasi program telah terselenggara dengan baik. Begitu pula aspek operasionalnyadapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan demikian para peserta didik mampu menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian untuktindak lanjutnya, penting diadakan pelaksanaan evaluasi sebagai bentuk menjaga kualitas sebuah lembaga pendidikan untuk meningkatkan terobosan baru menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, sehingga pengembangan kurikulum juga penting untuk terus dilakukan.

Pembenahan pada aspek materi pelajaran perlu diupayakan untuk diperbaharui agar *up to date*, selain itu berbagai macam model revisi serta metode pembelajaran dapat juga dilakukan bersama dengan upaya peningkatan kualitas guru di madrasah dan

pesantren sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Pembelajaran pada umumnya mengarah pada pemecahan masalah aktual di masyarakat dengan berdasar pada Al-qur'an dan hadits sebagai landasannya, sehingga dengan pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi jawaban atas banyak permasalahan yang dihadapi. Apabila upaya tersebut bisa dilakukan, maka dapat meningkatkan daya tarik sebuah lembaga pendidikan Islam, disamping pemenuhan sarana dan prasarana yang juga berperan penting.

Pengembangan materi agama yang ditinjau sebagai teori ilmiah modern perlu dikedepankan sebagai penguatan keilmuan bagi peserta didik agar menghasilkan lulusan yang *marketable*. Pernyataan Philip C. Schlechty yang dikutip oleh Rosyada menawarkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah dalam empat sektor yaitu diantaranya peningkatan daya tanggap dan respon terhadap permintaan wali murid dan siswa, kontinuitas dalam kepemimpinan (kebijakan, sistem, program yang berlanjut), peningkatan akuntabilitas guru serta kepala sekolah, dan *equity* atau layanan yang adil terhadap seluruh peserta didik.

Demikian pula pendapat J. Scheerens menyoroti adanya peningkatan kualitas dan efektivitas sebuah lembaga pendidikan dari beberapa aspek seperti keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, kebijakan, kepemimpinan, lingkungan, efisiensi waktu, kesempatan belajar dan terakhir adalah evaluasi. Sedangkan Seodijarto, menawarkan adanya perbaikan dan peningkatan

kualitas pendidikan Islam melalui lima aspek penting yaitu: peningkatan kualifikasi tenaga guru dengan mengutamakan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan relevan dengan bidang tugasnya, perbaikan dan pengembangan kurikulum pembelajaran, perbaikan buku teks sebagai bahan ajar, peningkatan efektivitas dan efisiensi supervisi pendidikan, dan pengembangan evaluasi.⁶

Peningkatan sebuah mutu pendidikan dapat dicapai melalui adanya kolektifitas sistem pendidikan yang melibatkan banyak aspek. Aspek-aspek itu saling keterkaitan seperti kurikulum, kebijakan pendidikan, materi, strategi, pendekatan dalam metode pembelajaran, fasilitas, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, profesionalitas dalam proses manajerial, proses pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, serta evaluasi, pengontrolan dan pengendalian mutu pendidikan. Adanya mutu dalam pendidikan diharapkan dapat menjamin kualitas *input*, *proses*, *output*, dan *outcome* sebuah lembaga pendidikan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikannya.

Tahapan pokok dalam melakukan evaluasi ada tiga yaitu *pertama*, mendefinisikan pekerjaan, maksudnya adalah memastikan seluruh pegawai paham akan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan. Tahap *kedua* adalah melakukan penilaian dengan cara membandingkan hasil kinerja pegawai dengan

⁶ Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, (Depok, Kencana, 2017), h. 42-43.

standar kinerja apakah sudah sesuai. Dan tahap ketiga yaitu melakukan umpan balik, maksudnya adalah menyampaikan hasil evaluasi para pegawai agar saling mengetahui hasil kerjanya untuk kemudian dilakukan tindak lanjut.

C. Tahapan Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu Berbasis Sosiologi Pendidikan

Pedoman dalam menerapkan *Total Quality Management* (TQM) yang efektif dan efisien untuk meraih keberhasilan hendaknya berpedoman pada beberapa atribut efisiensinya sebagaimana dikemukakan oleh Oakland dan Porter diantaranya:

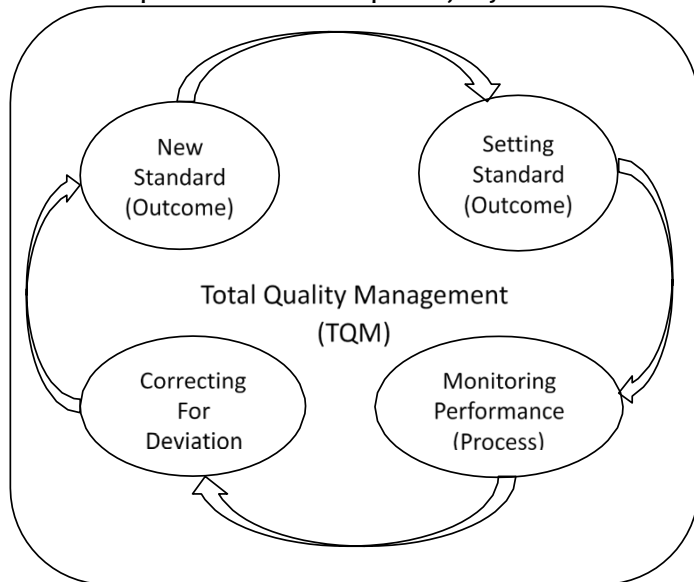
1. Komitmen (*commitment*) dalam menyajikan produk dan layanan yang efisien dan menguntungkan sebaiknya ditujukan oleh pihak manajemen.
2. Konsistensi (*consistency*) sebuah perusahaan untuk menyediakan produk dengan kinerja yang konsisten, misalnya ketepatan spesifikasi, jadwal, pengiriman, dan sebagainya.
3. Kompetensi (*competence*) sebuah perusahaan dalam menyediakan pekerja dengan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan yang diberikan, dengan harapan dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
4. Hubungan (*contact*) antara perusahaan dengan pelanggan harus terjalin dengan harmonis sebab tujuan perusahaan adalah menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
5. Komunikasi (*communication*) untuk menjalin

hubungan dua arah antara perusahaan dengan pelanggan, agar spesifikasi produk dan layanan yang diharapkan pelanggan dapat diterjemahkan dengan tepat oleh perusahaan.

6. Kredibilitas (*credibility*) untuk menumbuhkan rasa percaya diri sebuah perusahaan dari pelanggan dengan mempercayai penilaian konsumen. Rasa saling percaya ini diharapkan melahirkan komunikasi dan hubungan baik. Dalam perspektif sosiologi pendidikan komunikasi kepada orang tua dan siswa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. serta dibangun dengan baik.
7. Perasaan (*compassion*) untuk memiliki rasa simpati terhadap pelanggan eksternal, khususnya berkaitan dengan kebutuhan dan harapan mereka serta pelanggan internal ketika berhubungan dengan hak-hak mereka. Pandangan terhadap hal tersebut juga sangat bersifat sosiologis.
8. Kesopanan (*courtesy*) maksudnya adalah perusahaan menunjukkan sikap sopan kepada konsumen dengan menunjukkan sikap empati melalui para pegawainya. Khususnya pegawai yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Dalam hal ini juga sangat bersifat sosiologis.
9. Kerjasama (*cooperation*) dalam perusahaan untuk menciptakan iklim kerjasama yang baik dan teratur antara pekerja maupun antar perusahaan dengan para pelanggan. Hal tersebut juga bersifat sosiologis.
10. Kemampuan (*capabilitas*) sebuah perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengambil tindakan terkait dengan penyediaan

produk dan layanan. Pertimbangan sosiologis juga diperlukan dalam pengambilan keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

11. Kepercayaan (*confidency*) yang dimiliki sebuah perusahaan dengan mempunyai rasa percaya diri bahwa perusahaannya mampu menyediakan produk dan layanan sesuai harapan dan kebutuhan pelanggan. Rasa percaya diri tersebut diharapkan tidak hanya dimiliki perusahaan tetapi juga tertanam pada diri seluruh pekerjanya.⁷



Gambar. 1 Siklus TQM.

Secara operasional, manajemen mutu terpadu dioperasikan berdasarkan *setting standard* atau *outcome*,

⁷ Dr. Jamaluddin, M.Pd.I MANAJEMEN MUTU Teori dan Aplikasi pada Lembaga Pendidikan Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) MUTU Teori dan Aplikasi pada Lembaga Pendidikan Cetakan I, Jambi Desember 2017

monitoring performance atau *process, correcting for deviation* atau *output*, dan *new standard* atau *outcome*. Pertama, *Setting standard* merupakan penetapan standar suatu program dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua, *Monitoring performance* ialah pengecekan terhadap pelaksanaan standar, dalam hal ini biasanya muncul pertanyaan apakah pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga, *Correcting for deviation* adalah penemuan suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar atau perlu diadakannya perbaikan standar, kemudian keempat, *new standard* yakni menentukan standar baru untuk mencapai program tersebut, baik mengganti atau menambahkan standar yang lama. Semua unsur operasional TQM tersebut dilaksanakan secara berurutan dan sistematis.⁸

Manajemen merupakan sebuah proses pemecahan masalah sehingga tiap langkah manajemen tidak ubahnya sebagaimana beberapa langkah untuk memecahkan masalah. Manajemen atau pengelolaan adalah sebuah komponen integral yang tidak dapat dipisahkan melalui proses secara keseluruhan. Manajemen memiliki asal kata yaitu *to manage* yang maknanya mengurus, mengatur, melaksanakan atau mengelola *and controlling organizational resources*. TQM dapat dipahami sebagai pendekatan untuk memaksimalkandaya saing melalui

⁸ Ihwan Fauzi, "Analysis Of Ptkin Opportunities: Quality Measurement Through The Malcolm Baldrige Criteria For Using The World Class Universty", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 05 No. 01 (2021) : 1-13.

perbaikan yang terus-menerus dilakukan atas jasa, sumber daya, produk maupun lingkungan. Di dalam manajemen mutu terpadu terdapat serangkaian usaha untuk memaksimalkan seluruh fungsi sebuah organisasi sesuai dengan falsafah holistik yang dibangun berdasar pada konsep mutu, kerja tim, efektivitas, prestasi serta kepuasan pelanggan.⁹

Implementasi dari TQM di lembaga pendidikan sepertisekolah setidaknya terdapat lima prinsip yang bisa digunakan. Prinsip yang *pertama* adalah fokus pada pelanggan, prinsip *kedua* adalah keterlibatan total, *ketiga* adalah pengukuran, *keempat* adalah komitmen dan *kelima* adalah perbaikan yang berkelanjutan. Prinsip lain dari manajemen mutu terpadu antara lain adalah kepuasan pelanggan, respek pada setiap orang, manajemen yang berbasis pada fakta dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pelanggan yang terdapat dalam TQM meliputi pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal dapat terdiri dari guru, karyawan dan peserta didik sedangkan pelanggan eksternal adalah komite sekolah, masyarakat, pemerintah dan wali murid. Pada prinsipnya TQM ini telah melakukan perbaikan yang terus menerus sehingga untuk mengoptimalkannya diperlukan sebuah manajemen pengendalian mutu yang memadai. Artinya sebuah perencanaan dan pelaksanaan hendaknya dikendalikan sesuai dengan standar yang ditetapkan agar tujuan dan mutu yang diharapkan dapat terwujud dengan maksimal.

⁹ Zahroh, Aminatul, Total Quality Management: Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 92.

Sehingga pokok pembahasan dari TQM atau manajemen mutu terpadu ini adalah upaya pengendalian manajemen yang lebih bermutu dan berkualitas.

Selanjutnya dalam upaya mencapai perbaikan mutu yang berkelanjutan, perlu adanya strategi yang terstruktur dan dijadikan pedoman perbaikan. Strategi yang telah dirumuskan tersebut kemudian berfungsi sebagai media identifikasi dan pemecahan berbagai persoalan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu *brainstorming* dengan fungsinya untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan berbagai macam ide secara cepat dan tepat. Beberapa hal yang diperlukan untuk memaksimalkan *brainstorming* dalam upaya peningkatan mutu terdapat beberapa diantaranya: pertama, teknik afinitas jaringan kerja yaitu teknik yang digunakan sebagai pengelompokan sejumlah ide dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam ide yang saling memiliki keterkaitan.¹⁰

Kedua adalah diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa, teknik ini memberi anjuran kepada tim untuk melakukan pemetaan pada seluruh faktor yang menyebabkan terjadinya suatu hal sesuai dengan yang diinginkan, tujuannya untuk mengidentifikasi data seluruh faktor yang mempengaruhi mutu. Ketiga yaitu analisis kekuatan lapangan atau *force field analysis* merupakan sebuah analisis yang digunakan dalam mempelajari situasi yang memerlukan adanya

¹⁰ Sallis, Edward. Total Quality Management In Education, Terjemahan Ahmad Ali RiyadiFahrurrozi, (Yogyakarta: IRCiSoD,2006). 199-200.

perubahan termasuk perubahan dalam sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah. Keempat adalah *flowcharts* yaitu teknik yang paling banyak digunakan dalam TQM.

D. Indikator Keberhasilan Implementasi *Total Quality Management* Pada Lembaga Pendidikan Islam

Pada dasarnya hakikat dari tujuan institusi pendidikan adalah untuk menumbuhkan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan. Upaya pendukungnya dapat ditentukan melalui para *stakeholder* pada sebuah lembaga pendidikan. Dengan memahami proses serta kepuasan pelanggan, sebuah organisasi akan dapat menghargai dan menyadari kualitasnya. Sehingga dengan demikian seluruh usaha manajemen yang dilakukan untuk mendukung TQM hendaknya diarahkan sesuai dengan tujuan utama yaitu kepuasan para pelanggan.

Sumber daya manusia dengan memiliki standar kualitas lulusan yang bermutu sangat diharapkan lahir dari suatu sekolah atau madrasah yang bermutu. Jika menilik kualitas pendidikan di Indonesia apakah sudah dapat dikatakan mengentaskan permasalahan tentang pencapaian mutu dari sumber dayanya? Untuk bersaing dengan dunia global, iklim pendidikan di negara ini masih perlu banyak beradaptasi untuk melakukan perbaikan pada manajemen pendidikannya. Misalnya dengan melakukan berbagai macam cara seperti meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan yang profesional, melakukan perubahan budaya sekolah atau madrasah dengan perbaikan visi, misi, tujuan dan nilai-nilainya, serta

meningkatkan tunjangan pendidikan dan mengoptimalkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Maju tidaknya sebuah bangsa bergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Maknanya adalah jika pendidikan sebuah bangsa dapat melahirkan “Manusia“ yang berkualitas lahir batin, maka bangsa tersebut dapat maju, damai, tentram dan sejahtera. Begitu pula sebaliknya, apabila pendidikan sebuah bangsa mengalami stagnasi maka dapat dikatakan bangsa tersebut terbelakang disegala bidang. Dalam pembahasan mengenai kualitas sumber daya manusia, Islam memandang bahwa pembinaan sumber daya manusia tidak terlepas dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri, karena Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan bagi sumber daya manusia.

Konsep yang aktual dan relevan dalam pendidikan Islam dapat diaplikasikan sepanjang zaman. Mutu sebuah produk pendidikan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal dimulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Melalui konsep ini, lembaga pendidikan Islam diharuskan mampu merubah paradigma baru bagi pendidikan dengan berorientasi pada mutu. Seluruh aktifitas berinteraksi didalamnya diharapkan mengarah pada pencapaian mutu. Adanya perkembangan global telah menuntut dilakukannya

perubahan sebuah paradigma dalam dunia pendidikan. Sebagai upaya untuk melakukan hal tersebut, perlu adanya peran sebuah manajemen pendidikan yang signifikan untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang bermutu. Lulusan dengan pendidikan yang bermutu merupakan sumber daya manusia yang sangat diharapkan kontribusinya hingga saat ini. Sudah siapkah sistem pendidikan kita untuk menentaskan mutu SDM yang mampu berkompetisi secara profesional dengan bangsa lain?

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, dunia pendidikan harus memenuhi beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya, (1) memperbaiki manajemen pendidikan sekolah dan madrasah, (2) menyediakan tenaga kependidikan yang profesional, (3) melakukan perubahan budaya di sekolah atau madrasah baik visi, misi, dan tujuan, (4) upaya peningkatan pembiayaan pendidikan, dan (5) pengoptimalan dukungan masyarakat bagi jalannya pendidikan.

Selain aspek di atas, upaya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu sekolah maupun madrasah perlu memerhatikan beberapa hal diantaranya, perlu menyamakan komitmen mutu yang hendak dicapai oleh kepala sekolah dan madrasah, mengusahakan terciptanya program peningkatan mutu di sekolah dan madrasah, mewujudkan kepemimpinan kepala sekolah dan madrasah yang efektif, meningkatkan pelayanan administrasi oleh sekolah dan madrasah, serta memiliki standar mutu lulusan dengan jaringan kerja yang luas dan baik dengan didukung oleh penataan

organisasi yang memadai.

Serangkaian upaya yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan mutu di atas diharapkan dapat mencapai indikator dalam ciri-ciri tercapainya implementasi *total quality management* dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Asep Kurniawan (2010:97) memaparkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin dan staf pengajar hendaknya memiliki sikap yang visioner, pemersatu, berdaya, dapat mengendalikan rasio emosi dan integritas, mempunyai kualitas pendidikan yang kompeten untuk membantupeserta didik mengembangkan potensi kognitif, afektif, etika, sosial, moral serta dimensi intrapersonal lainnya, mempunyai kemampuan dalam pelayanan administrasi serta menghasilkan *output* atau lulusan yang cerdas secara akal maupun spiritual, berkemampuan kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terjun ke lapangan kerja.

Menurut pandangan ajaran agama Islam, dalam melakukan segala sesuatu hendaknya rapi, benar, tertib dan teratur. Proses pengerjaan apapun harus selalu dilakukan dengan baik dan tidak boleh sembarangan. Proses manajemen dimaknai sebagai hal penting yang tidak dapat dipungkiri lagi telah memiliki pengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan manusia. Melalui proses manajemen manusia menjadi paham akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Begitu pula pembahasan manajemen dalam dimensi pendidikan Islam yang telah menjadi istilah yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari guna

mencapai tujuan pendidikan. Dengan proses manajemen yang baik dan terarah, pendidikan Islam diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya. Islam pada dasarnya bukan sebuah sistem kehidupan yang praktis dan baku melainkan sebuah sistem yang berisi nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman hidup manusia. Mengutip ungkapan Prof. Dr. H. Abudin Nata, MA bahwa dalam Islam tidak didapati sistem pendidikan yang baku akan tetapi tercantum nilai moral dan etis yang seharusnya menjadi warna dalam sebuah sistem pendidikan.

Berangkat dari paparan di atas ada dua misi yang harus ditempuh dalam pendidikan Islam. Pertama adalah menanamkan pemahaman Islam secara komprehensif dengan tujuan agar para peserta didik mampu mengetahui ilmu yang diajarkan dalam Islam serta memiliki kesadaran untuk mengamalkannya. Pendidikan Islam sendiri sesungguhnya tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritik yang hanya menghasilkan seorang islamolog, akan tetapi melalui pendidikan Islam diharapkan dapat membantu menekan pembentukan sikap dan perilaku yang islami atau dengan kata lain untuk membentuk manusia *Islamist*. Kedua yaitu memberikan bekal keilmuan pada para peserta didik agar apabila nanti berkiprah dalam masyarakat dapat memberikan aksi nyata dengan *survive* dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang telah tercampur dengan budaya hidup modern. Disinilah sosiologi pendidikan ikut berperan dalam mewujudkannya.

Abuddin Nata menjabarkan bahwa dapat

dijumpai beberapa macam penyakit yang telah menimpa masyarakat dalam kehidupan modern yaitu, pertama adalah adanya disintegrasi antara berbagai ilmu pengetahuan (spesialisasi yang kaku) sehingga mengakibatkan terjadinya pengkotak-kotakan akal pikiran yang cenderung membingungkan bagi masyarakat. Kedua yaitu adanya kepribadian yang terpecah atau *splite personality* karena akibat kehidupan yang dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang terlampu terspesialisasi sehingga tidak mempunyai watak ketuhanan. Ketiga yaitu dangkalnya rasa keimanan, ketaqwaan dan kemanusiaan yang dimiliki oleh masyarakat karena diakibatkan budaya kehidupan yang individual dan rasional.

Keempat, tumbuhnya pola hubungan yang materialistik sebagai akibat dari kehidupan yang berlebihan dalam mengejar duniawi. Kelima, cenderung menghalalkan segala cara karena akibat dari paham hedonisme dalam pergaulan. Keenam, mudah depresi dan frustrasi karena terlampau percaya dan bangga akan ekspektasi dari kemampuan diri namun tidak diiringi sikap tawakal kepada Tuhan. Ketujuh, memiliki perasaan terasing di tengah keramaian (*lonely*) karena terbiasa memiliki sifat individual. Dan kedelapan adalah merasa kehilangan harga diri akan masa depan karena terbiasa melakukan perbuatan yang menyimpang. Kedelapan poin yang dipaparkan oleh Abuddin Nata di atas adalah beberapa bentuk akibat dari proses hidup yang telah terhegemoni budaya global karena dominasi peradaban budaya barat.

Sekularisasi ilmu pengetahuan merupakan ciri

khas adanya kaitan sebuah peradaban dengan peradaban barat yang sekuler dan liberal. Hal ini yang kemudian memunculkan sifat hedonistik dan individual karena implikasi dari kapitalis yang materialistik. Imbas adanya globalisasi yang kuat hendaknya diantisipasi oleh dunia pendidikan terutama Islam agar tidak terlibas arus hegemonisasi global akibat budaya barat. Sesuai dengan konteks ini, dunia pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sehingga dalam menerima arus informasi global tidak sekedar mengikuti namun juga memiliki bekal untuk dapat mengolah, memfilter, menyesuaikan serta mengembangkan segala sesuatu yang diterima melalui arus informasi tanpa merasa terhegemoni akibat kekuatan eksternal. Karena Islam bisa memberikan nilai-nilai dan norma yang fleksibel sebagai jalan hidup yang benar.

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, para pengelola lembaga pendidikan Islam tentunya menyadari akan tantangan di masa depan. Orientasi pendidikan Islam sendiri sejak awal tidak semata-mata untuk menekan pengisian ilmu umum namun juga penanaman ilmu jiwa berupa pembinaan akhlak serta kepatuhan dalam menjalankan setiap ibadah. Disamping itu, perlu juga untuk dipikirkan bagaimana upaya yang efektif dan memiliki pengaruh dalam menciptakan manusia yang memiliki kreativitas, inovatif, produktif serta mandiri, sehingga memiliki pegangan dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan.

Visi yang dimiliki oleh pendidikan Islam harus berintegrasi terhadap berbagai macam cabang ilmu

pengetahuan yang terkotak- kotak ke dalam ikatan tauhid atau ketuhanan. Peluang lainnya, pendidikan Islam diharapkan mampu memberi filter dan arahan pada setiap penyerapan ilmu pengetahuan yang belum sesuai dengan kaidah dalam Islam. Seluruh jenjang pendidikan Islam pada lembaga pendidikan formal maupun informal mempunyai peluang untuk mengupayakan peningkatan dengan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya dengan berdasar pada tuntunan Al- Quran dan as-sunnah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka gambaran negatif mengenai pendidikan Islam yang dipahami oleh masyarakat dapat terus melekat serta sulit dihilangkan. Bahkan dapat terjadi juga penanaman pendidikan Islam yang *haq* dapat hancur akibat kebathilan yang tersusun di sekelilingnya. Ali bin Abi Thalib mengemukakan bahwa “kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi dapat hancur akibat kebathilan yang tersusun rapi”.

Dalam kegiatan penjaminan mutu sebuah lembaga pendidikan, hendaknya mencakup beberapa pokok penting yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Pembahasan pertama mengenai perencanaan, perencanaan berpengaruh sangat besar dalam setiap pelaksanaan manajemen khususnya sumber daya manusia dalam sistem pendidikan. Perencanaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat meliputi beberapa langkah berupa pengadaan rekrutmen pegawai, seleksi serta pengadaan program pengembangan manajemen karir dan perencanaan

karir.¹¹ Perencanaan dapat berkaitan dengan apa dan kapan dilaksanakan, oleh siapa, dimana serta bagaimana proses pelaksanaannya.¹² Sebagaimana dipaparkan oleh Usman bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang hendak dilaksanakan dimasa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam perencanaan tersebut juga terdapat beberapa unsur seperti urutan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, proses dan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.¹³

Pendapat lain mengenai langkah yang harus diterapkan dalam mengembangkan perencanaan mutu dipaparkan oleh Sallis dari pendapat Juran yaitu, (1) merumuskan tujuan dari mutu berupa visi dan misi, (2) mengidentifikasi serta menganalisis kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan, (3) mengembangkan mutu lembaga untuk melihat respon masyarakat dalam menerima hasil mutu, (4) diharapkan dapat berinovasi dalam mengembangkan proses perbaikan mutu sebuah lembaga organisasi untuk hasil yang efektif dan efisien, (5) melakukan pengendalian pada setiap proses mutu serta mengubahnya menjadi beberapa rencana *output* sebagai bentuk kekuatan operasional dari proses

¹¹ Sowiyah, Manajemen Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), h. 27.

¹² Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), h. 9.

¹³ Husaini Usman, "Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan" (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 66.

pendidikan.¹⁴ Karena proses erencanaan mutu berkenaan dengan visi dan misi sebuah lembaga maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi ulang visi dan misinya. Setiap visi dan misi yang dibentuk hendaknya mempunyai tahapan atau langkah runtut untuk mencapai tujuan organisasi, keduanya harus jelas setiap konteks dan kontennya.¹⁵

Baharuddin menyampaikan bahwa dalam setiap konteks perencanaan pendidikan perlu disampaikan urutan langkah yang penting untuk dilakukan seperti, (a) mengkaji kebijakan yang lebih relevan, maksudnya adalah setiap pengembangan sebuah lembaga pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan kebijakannya masing-masing. (b) Menganalisis kondisi sebuah lembaga, langkah ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan, kekuatan dan kelemahannya sehingga kemudian dapat dicari jalan keluarnya. (c) Merumuskan tujuan pengembangan mutu, berdasarkan hasil kebijakan yang berlaku sebelumnya dan analisis bagaimana kondisi lembaganya, yang peruludilakukan selanjutnya adalah merumuskan tujuan pengembangan untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. (d) Mengumpulkan data dan informasi, data yang dikumpulkan berupa komponen yang berkaitan

¹⁴ Edward Sallis, "Total Quality Management In Education" UK. Kogan Page Ltd. Third Edition (Adobe eReader Format) Taylor and Francis e-Library (2005), 43.

¹⁵ *Ibid*

dengan tujuan yang hendak dicapai. (e) Menganalisis data dan informasi secara komprehensif. (g) Merumuskan dan menentukan program alternatif sesuai hasil analisis untuk kemudian dikembangkan sebagai upaya pencapaian tujuan. (h) Menetapkan urutan langkah dalam kegiatan pelaksanaan dengan penjabaran yang terperinci hingga akhir pada tahap pelaksanaan.

Kedua, Penggerakan atau Pelaksanaan. Kegiatan menggerakkan sumber daya manusia meliputi beberapa hal seperti bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat dalam membimbing dan memberi arahan, langkah pelaksanaan, bagaimana kesiapan lembaga dalam penggerakan, serta bagaimana prosesnya. Penggerakan ini dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh anggota agar dapat bekerja sama dengan lebih efektif. Oleh karena itu proses penggerakan harus dilakukan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang bersangkutan baik atasan maupun para bawahan.¹⁶

Dalam ilmu manajemen, fungsi pelaksanaan atau actuating mempunyai beberapa istilah yang hampir sama maknanya yaitu directing, staffing, motivating dan leading. Pelaksanaan (actuating) merupakan sebuah proses penggerakan bagi tenaga kerja untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan secara tanggung jawab demi mewujudkan efisiensi pada proses dan efektivitas tiap kinerja. Fungsi pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi kerja untuk mencapai visi dan misi organisasi dengan

¹⁶ Prim Masrokan Mutohar, “Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 48.

sungguh-sungguh dan efisien. Pada konteks pendidikan Islam, penggerakan adalah bentuk upaya menyuguhkan arahan, bimbingan dan dorongan pada seluruh sumber daya yang ada di sebuah organisasi agar dapat melakukan masing-masing tugasnya dengan kesadaran yang tinggi. Terdapat tiga dimensi penting mengenai perubahan yang dikemukakan oleh Pettigrew, Thomas, dan Whittington yaitu keterlibatan konten, konteks dan proses dalam setiap proses pengembangan mutu. Selanjutnya Feigenbaum juga menyebutkan beberapa cakupan strategi dalam pelaksanaan mutu yakni sebagai berikut, (1) dukungan perubahan terhadap tiap perilaku karyawan untuk lebih baik, (2) mempromosikan ide manajemen dengan berbagai inovasi penting, (3) menegakkan disiplin untuk menjaga kualitas ekonomi atau biaya, (4) menjembatani masukan berupa ide-ide perbaikan bagi perbaikan di masa depan, (5) membantu secara universal sesuai dengan fakta dalam pengambilan keputusan dan (6) mengukur hasil bisnis yang diperoleh secara terstruktur.

Pemaparan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan (*actuating*) merupakan bentuk usaha untuk menggerakkan seluruh pihak yang terkait agar bersama-sama menjalankan runtutan program kegiatan sesuai dengan bidangnya dengan baik dan teratur. Ilmu manajemen menjelaskan bahwa pelaksanaan atau *actuating* adalah fungsi yang berpengaruh secara fundamental, hal ini karena pelaksanaan merupakan sebuah bentuk pengupayaan berbagai macam

tindakan dari tingkat bawah hingga tingkat atas sebuah kelompok dalam usaha mencapai sasaran sebuah organisasi. Meski dapat ditanggapi bahwa tiap upaya dalam perencanaan dan pengorganisasian memiliki sifat yang vital, namun kurang berpengaruh secara konkrit apabila belum dapat mengimplementasikannya pada aktivitas yang sedang diusahakan oleh sebuah organisasi.

Beberapa pokok penting yang perlu dicermati oleh para karyawan dalam pelaksanaan *actuating* agar dapat termotivasi dalam melakukan pekerjaan apabila, (1) memiliki keyakinan dapat mengerjakan tugasnya, (2) memiliki keyakinan bahwa melalui tugas yang sedang dilakukannya dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri, (3) tidak merasa terbebani dengan masalah lain diluar tugasnya dalam melakukan pekerjaan, (4) menerima tugas berarti telah diberi kepercayaan untuk menyelesaikannya, dan (5) menjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, pelaksanaan yang dimaksudkan untuk menunjang peningkatan mutu adalah berpegang pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu diantaranya, pelaksanaan standar isi, pelaksanaan standar kompetensi lulusan (SKL), pelaksanaan standar proses, pelaksanaan standar penilaian, pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan standar pembiayaan dan pelaksanaan standar pengelolaan.

Ketiga, pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana proses pengawasannya, oleh siapa, kapan

prosesnya, bagaimana model pengawasannya, bagaimana hasilnya, serta bagaimana keefektifan dalam melakukannya. Proses pengawasan yang efektif diharapkan menjadi bantuan bagi kepala sekolah sebagai pemimpin dalam memajemen kembali pekerjaan yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa proses pengerjaannya berlangsung lancar sesuai dengan yang direncanakan. Apabila belum sesuai maka perlu diadakan perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proses manajemen bagi seluruh sumber daya harus terkelola dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam meningkatkan potensi para pendidik untuk mengembangkan dan mewujudkan visi dan misi pada lembaga pendidikan.

Proses penjaminan mutu para pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat meneguhkan upaya peningkatan kualitas sumber dayanya penting untuk mencermati beberapa hal berupa komponen dan strategi. Dikemukakan oleh Nasution dalam bukunya ketika pengajuan SPC (*Statistical Process Control*) menuliskan bahwa, Edward Deming mempunyai keyakinan bahwa adanya perbedaan atau variasi adalah sebuah fakta. Sedangkan pengawasan yang dipaparkan oleh Herujito adalah bagian dari fungsi bagi manajemen untuk melakukan pengamatan dan mengalokasikan berbagai penyelewengan yang terjadi.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dalam meraih tujuan suatu organisasi. Sehingga apabila kedepannya

terjadi penyimpangan maka telah memiliki rincian tindakan yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk mengatasinya. Maka dapat diberitahukan bahwa proses korelasi yang terjadi antara keempat fungsi manajemen dapat dipahami sebagai proses manajemen. Pada dunia pendidikan, proses pengawasan mutu dapat diawali pada saat siswa masuk sekolah sebagai *input* hingga pelaksanaan selama proses kegiatan belajar hingga lulus dengan mempunyai berbagai macam kompetensi pendidikan. Pengertian ini tidak hanya terletak pada apa yang direncanakan tetapi mencakup seluruh tujuan organisasi. Dalam prosesnya, yang dapat memengaruhi manajer adalah sikap, cara, sistem serta ruang lingkup pada pengawasan yang hendak dilangsungkan.

Kegiatan operasional pada lembaga pendidikan penting untuk dilakukan pengawasan dan koreksi pada setiap tindakannya untuk memperoleh tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pendapat Jens J. Dahlggaard, Gopal K. Kanji dan Kai Kristensen sebagaimana dikutip oleh Ishikawa bahwa terdapat sepuluh aktivitas pengawasan mutu atau *control quality* yang dapat berguna untuk memecahkan berbagai persoalan diantaranya, (1) memutuskan tema sebagai acuan dalam menetapkan visi, misi dan tujuan, (2) memaparkan argumen kenapa memilih tema, (3) menilai situasi yang ada disekitar, (4) melakukan analisis atau penyelidikan terhadap penyebab sesuatu terjadi, (5) menetapkan tindakan korektif yang hendak dilakukan, (6) melakukan pemeriksaan sebagai bentuk implementasi, (7) mengevaluasi hasil tindakan, (8) menetapkan

standarisasi, (9) mempertimbangkan masalah yang tersisa dengan refleksi dan (10) menetapkan perencanaan bagi masa depan.

Agar dapat mencapai kesuksesan, upaya melaksanakan runtutan proses secara sistematis sangat diperlukan oleh setiap organisasi maupun perusahaan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Siklus yang dilakukan melalui *plan, do, check, and action* (PDCA) merupakan sebuah konsep yang dapat berlaku di sini.

Konsep tersebut terdiri dari beberapa langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana serta tindakan korektif yang dilakukan terhadap hasil yang dicapai. Menilai akuntabilitas penggunaan evaluasi dalam organisasi berperan sangat penting, sehingga proses penilaiannya dapat juga disebut evaluasi. Proses penilaian ini dapat berbentuk netral, positif, negatif, atau gabungan dari keduanya. Para pengevaluasi kemudian dapat mengambil keputusan tentang nilai dan manfaat dari sesuatu yang dievaluasinya.

Berikut terdapat beberapa pandangan para ahli mengenai definisi evaluasi: (1) Worten dan Sanders mengungkapkan pendapatnya kalau evaluasi merupakan proses mencari suatu hal berharga. Sesuatu hal bernilai yang dimaksud dapat berupa informasi mengenai suatu program atau produksi maupun alternatif sebuah prosedur tertentu. Hal ini karena evaluasi bukanlah kegiatan baru karena senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Siapapun yang tengah mengerjakan suatu hal, tentu akan dapat menilai apakah yang dilakukannya telah sesuai

dengan keinginan atau belum. (2) Menurut pendapat Stufflebeam yang dikutip oleh Worthen dan Sanders menyampaikan bahwa evaluasi merupakan “*process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives*”. Evaluasi mempunyai beberapa unsur yang terdapat di dalamnya antara lain, proses (*process*), perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*), informasi yang berguna (*useful information*) serta alternatif keputusan. (3) Pemaparan lain oleh Anne Anastasi menyatakan bahwa evaluasi adalah “*a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils*”.

Selanjutnya Schermerlon mengartikan makna pengawasan sebagai kegiatan pemeliharaan dalam menetapkan ukuran kerja dan bagaimana upaya pengambilan langkah tindakan yang sesuai untuk dapat mendukung pencapaian hasil secara kondusif beriringan dengan tujuan kapasitas yang telah ditetapkan.¹⁷ Peran penting lainnya dari perencanaan dan pengawasan dalam fungsi manajemen adalah menetapkan apa saja yang harus dicapai dan bentuk tindakan perbaikannya (*corrective action*).

Pendapat lain dari Amir Dain mendefinisikan sebuah lembaga pendidikan Islam sebagai organisasi atau wadah yang secara otomatis bertanggung jawab terhadap pendidikan. Ia menyimpulkan definisi tersebut karena merujuk pada penekanan sikap dan tanggung jawab seorang pendidik kepada peserta didik, sehingga pada praktiknya bentuk tanggung jawab

¹⁷ Schemerhorn, “Management” (New York: John Wiley and Sons Inc., 2002), 97

tersebut menjadi sebuah kewajiban yang wajar dan bukan berbentuk tekanan atau keterpaksaan. Guna mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang bermutu maka penting untuk melakukan pengembangan visi dan misi pada masing-masing sekolah maupun madrasah serta departemen yang terdapat dalam wilayah tersebut. Untuk dapat fokus pada visi dan misi mutu terdapat lima pilar yang perlu diketahui yakni: (1) pemenuhan kepentingan para pelanggan, (2) mengarahkan jika terdapat keterlibatan total dari para komunitas di suatu agenda atau program, (3) mengembangkan sistem penskalaan pada nilai tambah pendidikan, (4) memberi tunjangan pada prosedur yang diperlukan oleh para pendidik dan peserta didik untuk mengelola transformasi dan (5) melakukan perbaikan yang berkelanjutan dengan harapan dapat membuat produk pendidikan menjadi lebih baik.¹⁸

¹⁸ Dalam manajemen, “pimpinan madrasah atau sekolah dituntut untuk memiliki visi, tanggung jawab, wawasan, dan keterampilan manajerial yang baik. Pemimpin harus dapat berperan sebagai lokomotif perubahan menuju terciptanya sekolah atau madrasah yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan lembaga sekolah atau madrasah yang lain. Untuk itu, kepala madrasah atau sekolah harus mampu menyanggah dua macam profesi, yaitu: profesi keguruan dan profesi administrasi (sebagai administrator).” Lihat: Sunhaji, *Manajemen Madrasah: Telaah Atas Realitas Manajemen Pendidikan di Madrasah*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006), 94. Lihat juga: Mujamil Qomar, “Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam” (Jakarta: Erlangga, 2007), 86

BAB III

PRINSIP, KOMPONEN DAN KEEFEKTIFAN MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu keluar dari persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga kualitas mutu pendidikan terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kecakapan SDM. Apalagi di era kecanggihan teknologi seperti saat ini di mana persaingan dan kompetisi di segala lini kehidupan cukup ketat yang kemudian menambah tantangan tersendiri. Kompetisi ini merambat pada seluruh sendi kehidupan tanpa terikat letak geografis. Guna memenangkan – minimal mampu menyaingi- tantangan-tantangan yang serba kompetitif ini maka memperbaiki kualitas pendidikan menjadi salah satu syarat permanen yang tidak bisa diganggu gugat.

Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas muslim, pendidikan di Indonesia kerap diyakini memiliki corak tersendiri yakni pendidikan berbasis keislaman. Dengan demikian, pendidikan Islam juga tidak dapat melepaskan diri dari berbagai tantangan dalam peningkatan mutu karena secara otomatis memaksa peningkatan mutu ini wajib untuk dilakukan secara continue. Harapannya, pendidikan Islam bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Guna mencapai peningkatan-peningkatan kualitas pendidikan maka salah satu kunci utama yang harus dimiliki adalah kapasitas daya saing

yang mapan.¹⁹

Peningkatan kualitas pendidikan Islam ini tentu harus melek terhadap kosnsep-konspe manajemen pendidikan salah satunya konsep manajemen mutu pendidikan. Dalam ranah pendidikan, manajemen mutu pendidikan merupakan angin segar bagi keberlangsungan lembaga pendidikan. Artinya, pendidikan Islam mengadopsi konsep manajemen modern merupakan bagian dari langkah untuk memacu daya saing apalagi secara teoritis manajemen mutu pendidikan diyakini mampu memberikan respon dengan cepat sekaligus cermat.²⁰

Pada hakikatnya, secara fungsional pendidikan dimaksudkan sebagai upaya pembentukan sumber daya manusia yang lebih kuat dalam memerangi tantangan global demi masa depan yang lebih bermartabat, oleh seorang individu maupun secara kolektif di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Bagi pemeluk Agama Islam, masa depan meliputi proses kehidupan di dunia serta keyakinan akan kehidupan setelahnya yakni, akhirat yang bahagia. Akan tetapi pada kenyataannya dunia pendidikan kita di Indonesia ini belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut ditandai dari fenomena minimnya mutu lulusan, problem solving mengenai pendidikan yang tidak berlanjut hingga lulus, atau biasa disebut sebagai tambal sulam bahkan pendidikan kita

¹⁹ Prim, Masrokan Mutohar, "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam", SOSIO RELIGIA. 2009. Vol. 8, No. 2, Februari 2009. Hlm. 518

²⁰ Mahmudin, dkk., "Manajemen Mutu Terpadu Dalam Perspektif Pendidikan Islam", SEMINAR NASIONAL. 2018. Hlm. 145

lebih berorientasi seperti proyek yang wajar apabila hasil dari proses pendidikan banyak mengecewakan masyarakat.²¹ Karya ilmiah ini berusaha untuk mengeksplorasi Efektifitas Manajajemen Mutu Terpadu dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Sosiologi Pendidikan.

A. Prinsip dan Komponen Manajemen Mutu Terpadu

Pada awalnya, konsep manajemen mutu berasal dari dunia perusahaan atau bisnis yang menekankan yang berupaya menentukan standar produk agar sesuai dengan selera konsumen atau kebutuhan dan tuntutan pasar. Dengan demikian, suatu perusahaan selalu berupaya untuk memperbaiki produknya agar betul-betul berkualitas dan laku di pasaran. Kualitas biasanya dapat diartikan karena keseluruhan deskripsi dan karakteristik suatu barang atau produk yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Sobry menyatakan bahwa kualitas ada dua macam yakni, kualitas mutlak. Kualitas mutlak adalah kualitas yang memiliki cita-cita tinggi dan standar tinggi yang hendaknya dipenuhi oleh kebutuhannya. Kedua, kualitas relatif berupa alat yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar kebutuhan yang dibuat.²²

Manajemen Mutu Terpadu ialah sebuah konsep

²¹ Mulyadi Hermanto, "Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Islam". *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 4 No. 2 2019., Hlm. 229

²² M. Sobry, "Proses Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Mutu Terpadu", *El- Hikmah (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, Vol. 10. No. 2 Desember 2016., Hlm. 214

yang menawarkan nilai-nilai bagi perkembangan organisasi pada berbagai sektor kehidupan. Sejauh ini Manajemen Mutu Terpadu sudah banyak di angkat dalam bidang bisnis dan ekonomi. Akan tetapi, hakikatnya MMT tidak hanya cenderung digunakan pada dua aspek tersebut namun nilai-nilainya dapat diimplementasikan pada dunia pendidikan, termasuk Lembaga Pendidikan Islam.²³

Dalam sejarah terjadinya manajemen mutu, terdapat tiga gaya utama sistem, yaitu: a) pengendalian internal; b) penjaminan mutu; c) manajemen mutu terpadu. Tiga gaya tersebut memerlukan pengendalian internal berupa sistem manajemen mutu yang diselenggarakan dengan tahapan pemeriksaan atau pendekatan pada sebuah produk jadi untuk menentukan apakah standar tersebut sesuai dengan selera yang ditargetkan. Jika tidak sesuai maka barang dagangan tersebut tidak dapat dipasarkan namun diteliti dan dipelajari dengan lebih seksama sehingga kelemahannya dapat ditanggulangi. Pihak yang berperan dalam melakukan pemeriksaan umumnya adalah pengawas yang dididik dan dipilih untuk tugas tersebut. Pada sistem ini jelas bahwa produk yang dihasilkan terus diperbaiki dan ditingkatkan sebagai landasan pembuatan produk berikutnya.

Penjaminan mutu kemudian dikembangkan menjadi sistem manajemen guna pencegahan atas

²³ Syaefudin, "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MI Unggulan Ash-Shiddiqiyah 3 Purworejo)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 2 Desember 2018., Hlm. 227

terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, pada runtutan proses pengadaan barang atau jasa perlu diupayakan lebih baik agar setiap tahapan terdistribusi secara cermat dari awal dan berlanjut sepanjang metode. Pada tahap ini, jika ada kesalahan, metode tersebut mampu menghadirkan gagasan perbaikan.

1. Prinsip Manajemen Mutu Terpadu

Dalam dunia pendidikan, pada hakikatnya Total Quality Management sesuai dengan Frankin P. Schargel yang dikutip oleh Syafrudin mengatakan bahwa mutu terpadu dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang memiliki keterlibatan dengan spesialisasi dalam upaya mencapai kepuasan dari keinginan pelanggan pendidikan, serta adanya perbaikan secara continue, berbagi peran dengan sesama pekerja, meminimalisir sisa pekerjaan dan pengerjaan ulang. Memadukan prinsip-prinsip mengenai mutu dengan berbagai pengalaman praktik dapat menghadirkan suatu model sederhana yang cukup efektif.

Guna menerapkan manajemen mutu terpadu di sekolah, Dahlgaard dalam bukunya, mensyaratkan lima prinsip manajemen mutu terpadu: komitmen manajemen (kepemimpinan); lebih fokus pada pegawai dan customers; fokus pada realita; perbaikan secara continue; dan partisipasi seluruh pihak. Senada dengan itu, Edward Deming mengurainya menjadi empat belas prinsip dasar yang dapat mendeskripsikan apa yang dibutuhkan sekolah untuk dapat mengembangkan budaya mutu terbaik: menciptakan konsistensi pada tujuan yang ditentukan; mengadopsi filosofi

kualitas total; minimalkan persyaratan pengiriman; menilai bisnis universitas dengan cara yang sangat baru, mengurangi harga pendidikan total; tingkatkan kualitas dan hasil dan kurangi dana; belajar sepanjang waktu; kepemimpinan atau leadership dalam pendidikan; hilangkan rasa cemas dan takut; hilangkan hambatan untuk sukses; mewujudkan budaya kualitas; peningkatan proses; membimbing siswa untuk berhasil; komitmen; dan tanggung jawab.

Lembaga pendidikan seperti SDIT dan SMPIT, misalnya, harus siap mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dan yang lebih penting harus dijadikan budaya dalam penerapannya di tingkat sekolah berbasis Islam terpadu, karena prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam lingkup pendidikan Islam.²⁴ Muhab, dkk menjelaskan bahwa prinsip-prinsip mutu terpadu yang diterapkan dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Pertama, meyakini bahwa pendidikan Islam dapat menjadi kegiatan dakwah atau pekerjaan mulia dan memberikan kontribusi, komitmen dan nilai kerja. Kedua, pendidikan dikurcurkan dengan ikhlas, hati yang ikhlas, pengorbanan yang tinggi, cara yang bijak, dan diperhitungkan kewajiban dalam mengakhiri perintah Allah, mengajak, membimbing manusia ke jalan yang diridhai Allah, mengakhiri kegiatan pendidikan bisa menjadi amanah yang diterima dengan baik, profesional dan profesional. bertanggung jawab. Ketiga, pendidikan sebenarnya

²⁴ *Ibid*, Mahmudin., Hlm. 149.

adalah mengajarkan seluruh isi Islam melalui apa yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun sunnah serta kemudian dipadukan dengan ilmu Allah. Keempat, mengutamakan keteladanan, pembentukan kepribadian pada peserta didik melalui kepribadian seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, aspek yang berpengaruh besar adalah dari segi ibadah dan akhlak. Prinsip tersebut bila dijadikan pijakan dalam pendidikan maka akan berkontribusi dalam percepatan sekaligus mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Pencapaian tersebut harus didukung dengan tim atau kerja amal antar komponen di sebuah sekolah.²⁵

2. Komponen Manajemen Mutu Terpadu

Komponen-komponen model implementasi Manajemen Mutu secara keseluruhan dalam dunia pendidikan meliputi: kepemimpinan; pendekatan yang berfokus pada customers; iklim organisasi; pemecahan tim; problem; ada data yang berarti; metodologi dan alat; pendidikan dan pelatihan. Bila diterapkan ke dalam pendidikan Islam alias pesantren maka yang dimaksud pemimpin dalam komponen ini adalah kiai, ustudz, dan seluruh jajaran penting di lembaga pesantren. Para pemimpin di lembaga pendidikan Islam, khususnya di pondok pesantren dan madrasah, adalah motivator, event organisator, bahkan penentu arah dari penerapan kebijakan sekolah dan madrasah yang dapat menyodorkan gagasan-gagasan untuk mencapai tujuan pendidikan.

²⁵ *Ibid*, Mahmudin., Hlm. 150.

Para santri atau seluruh peserta didik yang ada di lembaga pesantren adalah customers yang harus dijadikan titik fokus dari semua gagasan yang dituangkan oleh para pemimpin. Apabila gagasan tersebut betul-betul bisa menambah kualitas santri maka para pemimpin di lembaga pendidikan Islam tersebut bisa dikatakan telah berhasil dalam menganalisis persoalan-persoalan yang tengah dibutuhkan santri sebagai pelanggan. Tetapi, apabila masih gagal mencetak santri berkualitas berarti pemimpin kurang teliti dalam menganalisis persoalan.

Adapun iklim organisasi ini bila diterapkan pada lembaga pendidikan Islam bermakna keterpaduan antara ustadz, santri, dan organ-organ yang ada di lembaga pesantren. Namun demikian, masing-masing organ di pesantren memiliki perannya tersendiri. Kesemua komponen ini pada akhirnya harus mewujudkan kondisi yang kondusif dalam proses pendidikan serta pelatihan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Mulyadi menyodorkan konsep pemimpin yang ideal antara lain: 1) mencapai tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang ditargetkan; 2) mampu menyelesaikan tugas; 3) berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan sesuai dengan tingkat kematangan guru dan pegawai lainnya di lingkungan sekolah; 4) dapat memberdayakan guru untuk menyelenggarakan proses tutorial dengan baik, lancar dan produktif; 5) bekerjasama dengan tim pengelola; 6) siap memberdayakan guru untuk menjalankan proses

pelatihan dengan baik, lancar dan produktif.²⁶

B. Manajemen Mutu Terpadu Perspektif Sosiologi Pendidikan

Manajemen mutu terpadu bisa menjadi sebuah konsep dengan memiliki nilai-nilai yang baik untuk pengembangan organisasi di seluruh lingkup kehidupan. Sebagaimana pandangan Francis Broun mengatakan bahwa sosiologi pendidikan telah memerhatikan adanya pengaruh budaya pada wilayah lingkungan umum serta bagaimana cara orang-orang mendapatkan dan mengorganisasikan pengalamannya. Sementara itu, S. Nasution menjelaskan jika sosiologi pendidikan dapat menjadi ilmu yang membahas tentang cara-cara mengelola proses tutorial sehingga mendapatkan pengembangan kepribadian individu yang lebih kokoh.

Setidaknya manajemen mutu terpadu bila ditelisik dari sosiologi pendidikan tercermin dalam dua hal pokok yakni, *pertama*, sosiologi mencakup tujuan untuk menyelidiki proses manajemen manusia, baik dengan pelanggan atau karyawan, orang tua, siswa, dll. Pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat terhadap berbagai peristiwa manajemen harus dipertimbangkan dalam hal ini. Misalnya, seorang balita yang dididik dalam keluargayang sangat religius, setelah dewasa lebih cenderung menjadi jiwa spiritual. Anak-anak yang dididik dalam keluarga berpengetahuan lebih mungkin untuk menetap di jejak data, dan sebaliknya. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa

²⁶ *Ibid*, Mulyadi Hermanto,. Hlm. 242

konsep MMT dapat memberikan ruang yang memadai serta lebih luas bagi anak-anak kuliah untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya dalam lingkup pendidikan. Kedua, sosiologi pendidikan memiliki tujuan untuk menganalisis adanya pertumbuhan bagi kemajuan sosial. Beberapa ahli berpikir jika pendidikan menjadi harapan besar bagi kemajuan dalam masyarakat, karena jika seseorang memiliki ijazah yang lebih tinggi, ia lebih siap untuk menempati posisi yang lebih baik, dan ia memiliki pendapatan yang lebih tinggi, untuk memberikan bantuan keuangan. Sementara itu, memiliki banyak data dan keterampilan dapat mengembangkan aksi dan kreativitas kelompok.²⁷

Sekolah mungkin merupakan konsep yang mengandung makna ganda. Pertama, universitas mencakup makna sebagai berbagai bangunan atau lingkungan fisik dengan segala fasilitasnya yang dapat menjadi tempat berlangsungnya proses pelatihan bagi sekelompok individu. Jadi, setelah Anda mengatakan bahwa “sekolah” maka yang akan terlintas dalam pikiran adalah lingkungan fisik karena itu. Kedua, sekolah memiliki arti suatu proses atau kegiatan belajar. Selama ini, setelah mendengar kata “sekolah” maka yang terbayang adalah bahwa proses pendidikan diselenggarakan di lembaga pendidikan. dalam hal ini perguruan tinggi dipandang sebagai suatu pendirian untuk memenuhi kebutuhan khusus tertentu. Dalam pengertian lain, varsity didefinisikan sebagai sebuah struktur, varsity mencakup sebuah struktur yang akan melibatkan

²⁷ *Ibid*, Momy A. Hunowu., Hlm. 121

sekelompok orang dengan tugas menyimpulkan fungsi dan peran dalam memenuhi kebutuhan komunitas pengguna.

Selain universitas sebagai suatu sistem, bagian terkecil dari perguruan tinggi adalah kelas yang merupakan subsistem sosial terkecil. Ruang kelas bukan hanya ruang fisik, tetapi mencakup ruang sosial dan budaya. Pada hakikatnya, proses pendidikan adalah interaksi kegiatan dalam ruang lingkup kelas yang di dalamnya terjadi proses interaksi manusia, baik siswa maupun guru atau siswa dengan siswa lainnya. Ruang kelas selain sebagai tempat untuk mewujudkan pengetahuan juga merupakan tempat untuk berinteraksi dengan manusia lain. Perlu diperhatikan bahwa pembentukan sifat kedua setelah keluarga adalah sekolah. disinilah sering terjadi pelatihan mental dan intelektual, agar dapat membentuk kepribadian seseorang.

Dalam perspektif sosiologis, kelas mungkin merupakan bagian dari mikrososiologi yang mengkaji masa hidup suatu pengelompokan di sekolah dengan segala energi yang mengalir di dalamnya. Di kelas terdapat sekumpulan orang yang membentuk kelompok secara teratur dan saling bersatu dalam berbagi peran dan fungsinya dalam lingkup pendidikan. Sebuah kelas telah memenuhi definisi kualitas pengelompokan karena itu adalah sekelompok individu yang berbagi rasa keanggotaan standar dan berinteraksi satu sama lain. Sistem tersebut dapat berupa hubungan antar individu yang terjadi secara terus menerus dan membentuk suatu hubungan yang saling berhubungan dalam

kehidupan sehari-hari, bergantung dan dapat saling mempengaruhi.

Oleh karena itu, organisasi sosial ditandai dengan adanya berbagai kegiatan atau ragam individu yang berinteraksi secara timbal balik dan terus menerus.²⁸ Peran kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu aset terbaik dalam mencapai kualitas dan kepuasan pemangku kepentingan melalui proses peningkatan kualitas yang langgeng.

C. Efektifitas Manajemen Mutu Terpadu dalam Lembaga Pendidikan Islam

Keberhasilan sistem manajemen mutu terpadu di sekolah akan diukur dari sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan pendidikan baik dari faktor internal di sekolah maupun eksternal oleh wali siswa. Efektifitas sistem manajemen mutu terpadu dalam lembaga pendidikan ini dapat ditengarai terwujudnya beberapa hal: penyetaraan komitmen mutu oleh kepala sekolah, mengejar program peningkatan mutu sekolah, meningkatkan pelayanan administrasi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan dinamis, adanya standar mutu lulusan, terdapat jaringan kerjasama yang besar dan baik, organisasi sekolah yang tertata dengan baik, dan upaya untuk menciptakan iklim serta budaya sekolah yang kondusif.

Strategi sebagai upaya peningkatan kinerja tim dalam mencapai tujuan yang dikehendaki oleh sebuah lembaga adalah rasa saling ketergantungan,

²⁸ *Ibid*, Momy A. Hunowu., Hlm. 125

keselarasan, kesamaan bahasa, perluasan tugas, apresiasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan penanganan konflik, penilaian/tindakan. Guna keberhasilan dalam membangun kinerja tim tersebut tidak lepas dari proses interaksi sosial bagi elemen-elemen yang ada dalam organisasi hendaknya dikelola dengan tepat oleh seorang manajer. Pelibatan orang tua sebagai wali siswa dalam setiap proses pendidikan anak dalam pendidikan bisa menjadi hal yang vital. Orang tua memiliki kewajiban dalam pembentukan motivasi dan pengendalian diri pada anak sejak dini yang dapat menjadi modal besar bagi keberhasilan anak di kelas. Peran orang tua dalam pendidikan anak adalah orang tua harus mendukung perkembangan intelektual dan keberhasilan akademik anak dengan memberi kesempatan kepada mereka mengembangkan potensi diri untuk perkembangan kognitif yang lebih baik. Sehingga ketika menerima prestasi yang diperoleh sang anak, hal ini memang karena ia terlibat langsung dalam setiap proses pendidikan.²⁹

²⁹ *Ibid*, Mulyadi Hermanto,. Hlm. 246

BAB IV

“IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN” (MMTP) “PADA LEMBAGA PENDIDIKAN” PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Bangsa yang memiliki kualitas dilihat dari pendidikannya yang berkualitas, sehingga apabila pendidikannya berkualitas maka keadaan bangsanya pun berkualitas. Kita tidak bisa menyangka bahwa yang paling penting penting dalam kehidupan yaitu pendidikan. Dengan demikian, adanya perubahan dari kualitas mutu pendidikan tentu berpengaruh dalam proses penciptaan sumber daya manusia. Sebuah sistem pendidikan yang memiliki kualitas sangat erat kaitannya terhadap manajemen yang diterapkan di dunia pendidikan itu sendiri. Ada banyak jenis manajemen pendidikan namun karya ini secara khusus mengeksplorasi manajemen mutu terpadu (MMT).

Manajemen mutu terpadu atau MMT memiliki nilai-nilai penting demi berkembangnya sebuah organisasi di berbagai ragam kehidupan. Seperti kita ketahui, dunia bisnis dan ekonomi sudah banya mengadopsi MMT. Walaupun pada hakikatnya, MMT bukan hanya merujuk ke bidang ekonomi maupun bisnis saja, tapi nilai-nilai yang dimiliki MMT pastinya bisa diterapkan di pendidikan, dan dan pastinya juga di lembaga pendidikan islam. Uniknya, penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan ini menekankan lembaga pendidikan agar lebih mengutamakan pelayanan kepada peserta didik. Selain manajemen mutu terpadu bertujuan untuk menjamin peningkatkan lulusan sekaligus sebuah usaha dalam

memperbaiki unit sekolah secara menyeluruh. Dalam penerepan manajemen mutu terpadu mensyaratkan keharusan atas adanya sebuah upaya terpadu agar tujuan untuk memperbaiki atau menciptakan kultur pendidikan bukan sekadar angan-angan. Tentu semua itu diawali dari sikap dan pengambilan tindakan dari yang sudah menguasai dalam mengelola manajemen atau kepemimpinan khususnya di bidang pendidikan tersebut. Selanjutnya, sangat penting melibatkan individu lain di luar lembaga pendidikan dengan harapan dapat menyumbangkan kontribusi positif pada proses pencapaian kualitas pendidikan.

Pengertian dari implementasi manajemen mutu terpadu yaitu pengimplementasian dengan usaha untuk menerapkan suatu sistem yang berhubungan dengan mutu dan kualitas yang digunakan sebagai upaya dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, dan seluruh anggota organisasi pendidikan ikut dilibatkan. Penerapan manajemen mutu pada lembaga pendidikan disebutkan harus memiliki lima bagian penting untuk berkontribusi terhadap meningkatnya mutu proses kegiatan belajar mengajar seperti kualitas produk, proses, organisasi, kepemimpinan dan komitmen. Dari sini mengindikasikan bahwa manajemen mutu terpadu sangat menarik dieksplorasi tatkala diimplementasikan ke dalam manajemen lembaga pendidikan sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi selama ini pendidikan digadang-gadang mampu menghadirkan bermacam solusi atas segala persoalan yang mendera disegala lini dan bidang. Karenanya, tulisan ini disusun untuk memaparkan implementasi manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan guna mendorong

peningkatan pembangunan mutu pendidikan nasional. Sebab, SDM berkualitas didapatkan melalui pendidikan yang berkualitas dan pendidikan nberkualitas sangat dipengaruhi oleh implementasi manajemennya.

A. Langkah-Langkah dan Faktor Sukses Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan

Kata manajemen asal katanya dari “to manage” yaitu mengatur. Pengelolaan atau kegiatan mengatur ini dapat terlaksana karena adanya proses yang dilakukan berdasarkan tahapan dari beberapa fungsi manajemen, sehingga manajemen dimaknai sebagai sebuah proses untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.³⁰ Cortada sebagaimana dikutip Hennie mengemukakan bahwa manajemen mutu terpadu pendidikan memiliki langkah-langkah khusus yang harus dialui dalam pengimplementasiannya. Dalam beberapa sumber ilmiah disebutkan bahwa terdapat lima langkah tahapan transformasi yang dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi.

Lima langkah tahapan yang dikerjakan dengan penuh ketelitian akan semakin mudah menciptakan lembaga atau organisasi yang berkualitas dan memiliki mutu yang unggul. Lima langkah tahapan tersebut adalah kesadaran pada tahap awal, implementasi sebagian, aktivitas eksistensif, hasil-hasil nyata, dan terbaik dalam industri. Pada tahap awal menunjukkan bahwa suatu lembaga atau organisasi yang hanya sebagian kecil menyadari pemahaman tentang konsep manajemen mutu

³⁰ Edward Sallis, Manajemen Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 53

terpadu. Setelah mengetahui sedikit tentang konsep manajemen mutu, maka pengetahuan suatu organisasi akan semakin berkembang dan mengimplementasikannya seikit demi sedikit. Setelah mengetahui sedikit tentang konsep manajemen mutu, maka pengetahuan suatu organisasi akan semakin berkembang dan mengimplementasikannya seikit demi sedikit.

Setiap orang dalam organisasi telah memahami konsep manajemen mutu terpadu. Setelah mengetahui dan memahami konsep manajemen mutu terpadu serta implementasi manajemen mutu maka akan terlihat integrasi nyata yang sangat baik. Dalam tahap ini, organisasi atau lembaga akan mengadakan perbaikan secara berkelanjutan demi meningkatkannya mutu dan kualitas dan akan menghasilkan integrasi total. Setelah mengetahui pemahaman tentang manajemen mutu terpadu serta penerapannya, maka akan terlihat integrasi nyata yang sangat baik. tahap ini, organisasi atau lembaga akan mengadakan perbaikan secara berkelanjutan demi meningkatkannya mutu dan kualitas dan akan menghasilkan integrasi total.

Goetsch dan Davis menyajikan fase implementasi manajemen mutu terpadu pendidikan yang lebih spesifik dan tersusun. Tahap implementasi MMTP dibagi menjadi tiga tahap yaitu:³¹ *Pertama*, tahap persiapan. Pada tahap ini meliputi pembentukan manajemen mutu terpadu *steering committee*, membuat tim, pelatihan manajemen mutu terpadu,

³¹ Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm: 587

memuat beberapa instrumen pernyataan visi dan prinsip dijadikan pedoman, membuat target pencapaian, komunikasi dan publikasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan; identifikasi pendukung dan penolak, memperkirakan sikap karyawan, dan mengukur kepuasan pelanggan. *Kedua*, tahap perencanaan, meliputi: perencanaan penerapan, dan selanjutnya menggunakan siklus *plan, do, check, and adjust*; identifikasi proyek; komposisi tim; dan pelatihan tim. *Ketiga*, tahap implementasi meliputi: kegiatan tim; umpan balik kepada *steering committee*; dan umpan balik dari pelanggan.

B. Asesmen Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan

Asesmen implementasi pada pokok pembahasan ini termasuk dalam bagian yang terintegrasi pada pengajaran dan pembelajaran. Tatkala proses penilaian terjadi di kelas, maka ia menyimpan nilai tercepat. Melalui proses inilah mengapa penyebab sistem penilaian dapat selalu bergantung pada instruksi. Melalui penilaian yang positif maka tingkat pengajaran dapat ditingkatkan, dengan adanya instruksi para pendidik dapat meningkatkan perolehan nilai pada seluruh siswa. Evaluasi atau penilaian yang dimaksud dalam hal ini adalah penilaian yang menggunakan teknik dengan sinkron sesuai kompetensi dasar yang telah dikuasai. Proses penilaian ini dapat melalui tes tertulis, observasi, praktik maupun penugasan.³² Sallis

³² Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, Ed.3, 2009), hlm. 592

menjelaskan bahwa untuk mengasesmen penerapan MMTP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menggunakan beberapa indikator antara lain: akses, servis untuk pelanggan utamanya bagi peserta didik, kepemimpinan, lingkungan fisik dan sarana prasarana, sistem belajar mengajar yang efektif, peserta didik, tenaga kependidikan, hubungan masyarakat dengan organisasi dan standarisasinya.

Dalam mengaplikasikan manajemen mutu di lembaga pendidikan syarat-syarat yang berlaku antara lain: sekolah harus secara berkelanjutan melaksanakan perbaikan mutu produk (*output*) sehingga kepuasan para pelanggan dapat terpenuhi baik eksternal maupun internal; mewujudkan kepuasan para warga sekolah, komite sekolah, serta penyumbang dana pendidikan di sekolah tersebut;

memiliki pandangan serta wawasan yang luas dan maju; fokus yang paling utama yaitu tertuju pada proses, dan kemudian hasil akan menyusul; menciptakan kondisi yang nyaman sehingga seluruh warga sekolah dapat aktif melakukan kontribusi dalam menciptakan keutamaan mutu; menciptakan kepemimpinan yang memiliki orientasi pada bawahan serta cakap memotivasi warga sekolah untuk senantiasa berkembang maju dengan tidak memanfaatkan cara yang otoriter, sehingga menumbuhkan atmosfer belajar yang kondusif bagi terbentuknya ide-ide baru; memberikan sebuah apresiasi, reward atau bentuk pengakuan bagi yang mendapatkan prestasi serta mudah memberikan maaf atau lapang hati bagi yang siapapun yang belum berhasil; seluruh keputusan yang diambil harus sesuai

berdasarkan data, kemudian berdasarkan pengalaman atau pendapat bersama; setiap langkah kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki ukuran yang jelas, sehingga pengawasan lebih mudah dilakukan; seluruh program pendidikan dan pelatihan hendaknya menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan mutu

C. Manajemen Mutu Pendidikan dalam Sosiologi Pendidikan

Adanya pengadaan sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menciptakan proses pendidikan yang berkemajuan. Ukuran dan jenis sekolah memiliki variasi tergantung pada sumber daya yang ada dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya. Sebuah sekolah atau lembaga pendidikan mungkin sangat sederhana karena menjadi lokasi bertemunya pendidik dan peserta didik, namun terdapat pula kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang serta puluhan ribu pendidiki, tenaga kependidikan dan peserta didiknya.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat 2 menyatakan jika pendidikan nasional merupakan sistem pendidikan yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dengan berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Republik Indonesia, serta aktif dan tanggap menghadapi tuntutan zaman. Dikarenakan hal ini seluruh proses dan bentuk tujuan pada sistem pendidikan nasional harus senantiasa berpedoman pada keduanya. Agar dapat diterima

oleh masyarakat luas maka hendaknya mempunyai kemampuan atau skill untuk dapat beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan globalisasi. Dengan demikian, maka orientasi pendidikan senantiasa merujuk pada dua pokok utama yaitu melestarikan karakter dan budaya nasional serta menciptakan alumni pendidikan yang mampu berkompetisi di dunia global dengan berpikiran terbuka dan memiliki landasan yang kuat.

Selanjutnya Vaizey John menjelaskan adanya proses pendidikan yang sesungguhnya yaitu adanya prosedur dalam setiap aktivitas belajar mengajar di dalam ruang kelas. Melalui sudut pandang sosiologi terdapat beberapa macam pendekatan sudah diterapkan sebagai alat analisis dalam meneliti keseluruhan proses yang terjadi di dalamnya. Sedikitnya tiga alasan untuk menempatkan sekolah sebagai prioritas utama dalam penanaman modal jangka panjang. Pertama, sekolah merupakan instrumen bagi kelanjutan ekonomi bukan sekedar pertumbuhannya. Kedua, investasi pada sekolah dapat memberikan takaran nilai yang lebih tinggi dibandingkan bidang lain. Ketiga, investasi pada bidang pendidikan juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, politis, budaya, dan fungsi kependidikan.

Pada praktik manajemen pendidikan era modern, terdapat lima fungsi pendidikan yang salah satunya adalah fungsi teknis ekonomis yang baik digunakan untuk tatanan individu hingga mendunia. Fungsi secara teknis ekonomis menetapkan kontribusi bidang pendidikan bagi perkembangan

perekonomian. Seperti contohnya, melalui pendidikan dapat membimbing generasi muda dalam memperoleh ilmu pengetahuan serta kecakapan yang sangat dibutuhkan untuk bekal hidup dan ikut andil dalam setiap kompetensi yang kompetitif. Hal ini terbukti ketika banyak generasi muda yang telah memperoleh pendidikan tinggi, tingkatan pada taraf hidupnya juga dapat semakin baik. Proses peningkatan ini dapat terjadi karena mereka lebih produktif dengan hasil pendidikan yang diperolehnya jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak mengenyam pendidikan. Produktivitas dalam hidup tersebut dapat diperoleh karena mereka juga telah menerima berbagai macam keterampilan teknis. Sehingga pada akhirnya, salah satu objek sasaran yang harus dicapai melalui pendidikan adalah dapat memupuk dan mengembangkan keterampilan dan meningkatkan taraf kehidupan.³³

³³ Abdul Rahmat, *Sosiologi Pendidikan*, ideas Publishing

BAB V

BUDAYA ORGANISASI DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Para ahli ilmu antropologi dan ilmu pendidikan menyetujui bahwasannya budaya merupakan suatu dasar terbentuknya sebuah kepribadian manusia, dengan adanya budaya dapat mengetahui seperti apa identitas seseorang, masyarakat, bahkan identitas suatu lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan dapat dipahami secara umum mengenai peran budaya yang sangat melekat dalam tatanan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya budaya ini berkembang menjadi sebuah inovasi pendidikan yang sangat cepat berupa nilai-nilai religius, filsafat, etika, dan estetika yang terus dilakukan. Terutama yang lebih mengarah pada suatu lembaga rasanya budaya organisasi memegang peranan sangat penting. Sebab akan menjadi lembaga tersebut lentur, fleksibel, dan elastis, sebagaimana budaya yang tidak akan pernah mengalami kejumudan dan akan menjadi sangat sempurna jika di padu dengan agama yang bersumber dari wahyu ilahi. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa agama termasuk dalam lingkungan keagamaan. Karena hal ini, seluruh umat beragama dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan budayanya. Namun apabila tidak ada kolaborasi atau saling pengertian maka budaya dapat menjadi alat untuk menyingkirkan ajaran agama dalam dunia pendidikan.

Bermacam cara masih terus dilakukan dengan mengupayakan berbagai usaha agar peningkatan mutu pendidikan ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Mulai dari kualitas peningkatan pendidikan

pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atassampaiperguruan tinggi. Total Quality Management (TQM) merupakan yang dianggap upaya yang sebelum disosialisasikan tepat di kalangan dewasa ini. Adapun istilah dari TQM merupakan aturan yang menungasi suatu perkembangan budaya yang ada pada sebuah organisasi (pendidikan), serta bisa menyentuh hati dan pikiran orang lain untuk menuju kualitas mutu yang diinginkan. Menciptakan, memelihara, dan menjaga terhadap berlanjutnya budaya Total Quality Management (TQM) di sekolah merupakan bagian penting dalam penerapan Total Quality Management (TQM).

Budaya dalam ruang lingkup sekolah adalah faktor yang berperan penting dalam proses pembentukan siswa yang selalu optimis, kreatif, tampil, berani, dan memiliki kecakapan baik secara personal maupun pada bidang akademik. Sekolah-sekolah favorit yang memiliki keunggulan dan kesuksesan pendidikan tertentu biasanya sudah dapat terlihat dari beberapa faktor-faktor variabel yang mempengaruhinya seperti halaman perolehan nilai-nilai dan kondisi fisik. Meski demikian terdapat beberapa halaman yang tidak tampak namun justru lebih berpengaruh terhadap kinerja individu dan organisasi itu sendiri yang mencakup (values), nilai-nilai budaya, keyakinan (beliefs), dan norma perilaku yang disebut sebagai sisi/ aspek manusia dan organisasi (the human side of organization).

A. Konsep Budaya Organisasi

1. Pengertian Budaya Organisasi

Pemahaman tentang budaya organisasi tidak terlepas dari konsep dasar mengenai budaya yang termasuk dalam salah satu terminologi bidang sosiologi. Akdon menjelaskan pendapat Edward yang dikutipnya bahwa untuk memaknai proses kebudayaan menjadi sebuah kesatuan yang kompleks dengan terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, maupun adat di dalamnya maka seseorang harus hidup dengan bermasyarakat.³⁴ Dari penjelasan yang telah disebutkan, kita dapat mengambil dua kata kunci yang merupakan , yakni “budi” dan “daya”. Budi artinya akal dan hati sebagai perwujudan dari daya yang berarti karya, cipta dan karsa manusia.

Pada sebuah lembaga, budaya organisasi berperan penting karena dapat menjadikan lembaga tersebut fleksibel karena tidak mengalami kemunduran dengan terus mengikuti arus zaman dan dapat menjadi sempurna ketika dikombinasikan dengan wahyu melalui sebuah agama. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa agama termasuk dalam lingkup kebudayaan. Itupun jika umat beragama mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan budayanya.³⁵ Adapun budaya pada umumnya di tempat paling

³⁴ Hikmat, Manajemaen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.203.

³⁵ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009) cet. Ke-1, hlm. 247.

bawah ataupun di kehancuran, sebab dalam budaya ini selalu mencantumkan bagaimana tentang seseorang itu melihat, berpikir, bertindak, dan merasakan ataupun serta bereaksi. Selanjtnya esensi ini mengatakan, bahwa dalam budaya organisasi ialah paradigma dasar dugaan untuk melahirkan, menemukan, atau pengembangan dalam kelompok agar belajar beradaptasi dari luar serta mengabungkan ke dalam organisasi tersebut. Dan apa yang harus dilaksanakan baik secara konsisten dan serta valid, namun disini juga sebagai anjuran bagi karyawan baru untuk memeriksa sebagai peneriman, pikirannya, ataupun perasaannya yang ada di dalam kaitannya dengan semua permasalahan secara detail dan rinci.³⁶

Pendapat Robbins yang dikutip oleh Siswanto dan Sucipto, memaknai budaya organisasi sebagai sebuah nilai yang mendapat dukungan organisasi atau falsafah dengan memberi kebijaksanaan pada pegawai maupun pelanggan, cara memperlakukan pekerja, maupun asumsi yang baik serta kepercayaan yang mendasar diantara para anggota organisasi.³⁷ Sistem nilai, norma, aturan, falsafah, kepercayaan dan sikap, kesemuanya dianut bersama oleh para anggota dan akan berpengaruh terhadap para pekerja pola manajemen organisasi. Budaya

³⁶ Eny Wahyu Suryanti, *Pengembangan Budaya Organisasi di Sekolah*, LIKHITAPRAJNA, Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume 19, hlm. 3.

³⁷ siswanto dan Agus Sucipto, *Teori dan Perilaku Organisasi*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hlm. 141.

organisasi tercermin pada pola pikir, berbicara dan perilaku yang konsisten pada para anggota. Dengan demikian, budaya organisasi dapat diesensikan dengan nilai, norma, aturan, falsafah, ataupun keyakinan yang dipercaya organisasi yang tercantum dalam asumsi akal ataupun tingkah anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi atau cara pandang yang sama dari para anggota organisasi. Sehingga budaya organisasi sering disebut dengan sistem bersama.

Pandangan Stephen P. Robbins dan Timothy A. Jug menyatakan jika terdapat tujuh karakteristik utama budaya organisasi. Pertama, inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko, dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana para anggota diberi dorongan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Kedua, perhatian pada suatu hal yang rinci, sehingga para anggota diharapkan selalu melakukan pengukuran, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Ketiga, orientasi pada hasil untuk mengetahui sejauh mana sistem manajemen fokus pada produk atau hasil dibandingkan dengan teknik dan proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Keempat, orientasi pegawai yang berkaitan dengan sejauh mana pihak manajemen mempertimbangkan setiap keputusan bagi para anggotanya. Kelima, orientasi tim yang memiliki kaitan untuk mengetahui tingkat kompetensi yang dimiliki oleh tim dibandingkan dengan individu. Keenam, keagresifan setiap anggota dalam berproses secara kompetitif dibandingkan santai dan mengikuti alur. Ketujuh, stabilitas untuk

mengetahui sejauh mana kegiatan dalam organisasi menekankan adanya pertahanan status quo jika dibandingkan dengan pertumbuhan.³⁸

2. Tingkatan dan Manfaat Budaya Organisasi

Dalam mempelajari budaya organisasi terdapat beberapa tingkatan organisasi yang perlu dipahami. Apabila disusun dalam suatu skema bertingkat menurut Schein maka topik suatu tingkatan budaya tersebut tersusun dari puncak sebagai berikut: pertama, Artefak. Pada tingkat ini budaya bersifat kasat mata, seringkali tidak dapat diartikan. Pada artefak bisa berupa budaya fisik (*material culture*) maupun budaya perilaku (*behavioral culture*); misalnya lingkungan fisik organisasi, teknologi dan cara berpakaian, perilaku orang-orang di dalam organisasi dan lain-lain. Kedua, Nilai. Nilai ini tidak bisa diamati, sehingga tidak dapat dilihat langsung sehingga proses menyimpulkannya sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang memiliki tempat rahasia atau melakukan analisis dokumen. Nilai ini merupakan penggerak budaya dalam artefak. Selain itu, nilai merupakan titik kerangka evaluasi yang dipergunakan anggota untuk menilai organisasi. Ketiga, Asumsi dasar. Asumsi dasar merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta tentang hakikat organisasi mereka. Asumsi dasar ini menjadi penggerak awal

³⁸ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Juge, *Perilaku Organisasi*, penerjemah Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 256-257.

terhadap nilai; dan nilai yang diyakini para anggota organisasi akan menjadi penggerak pada budaya tampak (artefak).

Berbagai macam organisasi memaknai budaya organisasi tentu dengan caranya masing-masing. Robbins menjelaskan jika budaya organisasi merupakan sebuah sistem nilai bersama yang terdapat pada sebuah organisasi untuk menentukan tingkatan karyawan dalam melakukan kegiatan selama proses pencapaian tujuan organisasi. Budaya organisasi juga dipahami sebagai suatu nilai yang menjadi pedoman dalam setiap permasalahan eksternal serta bagaimana usaha perusahaan dalam menyesuaikan proses integrasinya. Oleh karena itu para anggota organisasi harus memahami nilai yang terkandung dalam setiap proses budaya organisasi agar memiliki pedoman dalam bertindak laku.³⁹

Sutrisno dalam tulisannya mengutip pendapat Robbins bahwa budaya organisasi memiliki beberapa manfaat bagi sebuah organisasi. Manfaat pertama adalah sebagai peran pembeda, kedua sebagai sebuah identitas bagi para anggota organisasi, ketiga, melalui budaya organisasi dapat mempermudah tumbuhnya komitmen yang lebih luas bagi organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dan keempat dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kemantapan dalam menerapkan sistem sosial yang lebih baik.

³⁹ Chusnul Chotimah, *Membangun Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan*, Empirisma Vol. 24 No. 2 Juli 2015, hlm. 291.

Uraian manfaat budaya organisasi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, budaya organisasi sebagai perekat para anggota, sebagai acuan dalam melakukan seluruh pekerjaan, sebagai bentuk sinergi dalam menyatukan langkah sebuah organisasi, digunakan sebagai sebuah strategi dalam memotivasi para anggota organisasi, sebagai bentuk kontribusi positif organisasi untuk mengembangkan produktivitasnya, untuk membantu memperlancar komunikasi antar anggota organisasi dan sebagai teknik atau acuan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik organisasi.⁴⁰

3. Pengembangan Budaya dan Sosialisasi Nilai-nilai Budaya
 - a. Nilai-nilai dalam Budaya Organisasi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh O'Reilly, Chatman dan Caldwell menunjukkan jika terdapat makna penting dari nilai-nilai budaya organisasi dalam mempengaruhi perilaku dan sikap individu yang berbeda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa terdapat hubungan antara seseorang dan organisasi terhadap tingkat kepuasan kerja, komitmen dan turn over atau tingkat pergantian karyawan. Hal ini karena individu yang mempunyai kesesuaian dengan budaya organisasi memiliki kecenderungan untuk

⁴⁰ Jurman, *Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Sma Negeri 1 Simeulue Timur*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2014 VOL. XIV NO. 2, hlm. 279.

berspekulasi tinggi akan kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi, sehingga mereka memiliki intensitas tinggi untuk tetap tinggal dan bekerja di bawah naungan sebuah organisasi.

Namun dapat terjadi kebalikannya jika budaya sebuah organisasi hanya memiliki komitmen dan kepuasan yang rendah sehingga mengakibatkan kecenderungan para anggota untuk meninggalkan organisasi tentu akan lebih tinggi.

Penelitian tersebut menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan jika budaya organisasi mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi dengan adanya peningkatan output yang berkualitas serta dapat mengurangi biaya pengadaan tenaga kerja.⁴¹ Pemahaman dan kesadaran akan makna penting budaya organisasi bagi seorang individu dapat menjadi dorongan para manajer sebagai pemimpin untuk menciptakan kultur yang menekankan pada yang lebih menarik bagi karyawan (interpersonal relationship) dibanding dengan kultur yang menekankan pada work tasks. Robbins menjelaskan adanya sepuluh karakteristik yang menjadi ini organisasi. Pertama, member identity, yaitu identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan, dibandingkan dengan identitas dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing. Kedua, group emphasis, yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama

⁴¹ Chusnul Chotimah, *Membangun Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan....*hlm. 292.

lebih ditekankan dibandingkan kerja individual. Ketiga, *people focus*, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil digunakan untuk mempertimbangkan keputusan tersebut bagi anggota organisasi. Keempat, *unit integration*, yaitu seberapa jauh unit-unit di dalam organisasi dikondisikan untuk beroperasi secara terkoordinasi. Kelima, *control*, yaitu banyaknya/jumlah peraturan dan pengawasan langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan.

Keenam, *risk tolerance*, yaitu besarnya dorongan terhadap karyawan untuk menjadi lebih agresif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Ketujuh, *reward kriteria*, yaitu berapa besar imbalan dialokasikan sesuai dengan kinerja karyawan dibandingkan alokasi berdasarkan senioritas, favoritism, atau faktor-faktor nonkinerja lainnya. Kedelapan, *conflict tolerance*, yaitu besarnya dorongan yang diberikan kepada karyawan untuk bersikap terbuka terhadap konflik dan kritik. Kesembilan, *means-ends orientation*, yaitu intensitas manajemen dalam menekankan pada penyebab atau hasil, dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan hasil. Dan kesepuluh, *open-sistem focus*, yaitu besarnya pengawasan organisasi dan respon yang diberikan untuk mengubah lingkungan eksternal.

b. Membangun Budaya Organisasi di Sekolah Untuk Pengembangan Lembaga

Filosofi pada sebuah lembaga khususnya lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai dan kepercayaan di dalam sebuah organisasi. Peran penting yang dimaksudkan adalah pembentukan konsep berpikir serta bertindak yang kemudian diterapkan dan dilakukan oleh para pengelola pendidikan pada saat menghadapi hambatan dan berbagai macam tantangan. Tidak hanya demikian, nilai dan kepercayaan sebuah organisasi juga dapat digunakan untuk memupuk seluruh kekuatan dan menilik peluang dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan Islam mempunyai ciri khas yang melekat pada budaya organisasinya yaitu spirit ruhul jihad. Spirit ini menekankan pentingnya bekerja dengan mengabdikan diri pada sebuah lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari jihad yang paling agung dalam Islam. Dalam konteks manajemen modern, ruhul jihad sebaiknya dioperasionalkan dalam aspek yang lebih spesifik, hal ini dikarenakan sebagian pengelola lembaga pendidikan Islam masih memandang bahwa ruhul jihad hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan. Sementara aspek yang lain seperti penjaminan mutu (quality assurance), pelayanan yang memuaskan (customer satisfaction) dan sebagainya, nampaknya masih belum ada perhatian khusus.

Selanjutnya dalam Prosedur sosialisasi budaya yang umumnya dapat kita lihat bagi calon peserta didik, ataupun karyawan maupun guru yang terlibat dalam lingkungan pendidikan) baru yang akan bergabung suatu lembaga ataupun anggota yang baru saja diterima menjadi anggota dalam suatu lembaga pendidikan, sebab belum mengenal budaya organisasi secara komprehensif. Adapun perkataan Luthan menjelaskan bahwa proses sosialisasi budaya organisasi dalam suatu perusahaan dapat dilakukan melalui tahap- tahap berikut ini:⁴² pertama, seleksi calon karyawan perusahaan. Di mana sejak awal pemilihan calon karyawan, organisasi dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan apakah calon karyawan tertentu akan dapat menerima kultur yang ada atau justru akan merusak kultur yang telah terbangun; kedua, penempatan karyawan pada suatu pekerjaan tertentu, dengan tujuan menciptakan kohesivitas di antara karyawan; ketiga, pendalaman bidang pekerjaan; tahap ini dimaksudkan agar seseorang anggota semakin mengenal dengan baik dan menyatu dengan bidang tugasnya serta memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing; keempat, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan, dimaksudkan agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya

⁴² Fred Luthans, *Organizational Behavior*, 7th Ed., McGraw-Hill International Edition, 1995, dalam Dwi Irawati, "Implementasi Nilai-nilai."

sesuai dengan ketentuan organisasi sebagai salah satu norma budaya serta dapat lebih intensif menerapkannya di masa datang; kelima, menanamkan kesetiaan pada nilai-nilai luhur yang dimiliki organisasi; keenam, memperluas cerita dan berita tentang berbagai hal berkaitan dengan budaya organisasi, misalnya cerita tentang pemutusan hubungan kerja kepada seseorang karyawan karena menyalahgunakan kekuasaan/wewenang untuk kepentingan pribadi meskipun karyawan tersebut sangat potensial. Hal tersebut menekankan betapa pentingnya moral bagi setiap karyawan, dan nilai moral ini tidak dapat ditebus hanya dengan potensi yang dimiliki; ketujuh, pengakuan atas kinerja dan promosi, diberikan kepada karyawan yang mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjadi teladan karyawan lain, khususnya karyawan yang baru bergabung.

Proses sosialisasi dilakukan sejatinya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja serta meningkatkan komitmen anggota. Ketika tingkat anggota tinggi secara otomatis tingkat turnover anggota rendah. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberhasilan proses sosialisasi budaya sangat bergantung pada derajat keberhasilan dalam mencapai kesesuaian dengan budaya organisasi, ketepatan metode sosialisasi yang dipilih dan dipakai, serta peran pemimpin dalam mengarahkan dan mendorong pemahaman, pengakuan, dan

pencapaian kesesuaian budaya organisasi dengan individu (anggota) baru.

Proses sosialisasi diharapkan dapat memberikan kepuasan bersama antar anggota organisasi, artinya organisasi dapat memberikan kepuasan kepada anggotanya, sebaliknya anggota dapat memberikan kepuasan kepada organisasi melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif yang berdampak bagi perkembangan organisasi. Misalnya upaya yang dilakukan untuk mengembangkan budaya organisasi sekolah berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang juga merupakan administrator sekolah. Berkaitan dengan hal ini seorang kepala sekolah harus memiliki pandangan yang komprehensif mengenai lingkungan sekolah, sehingga kerangka kerja yang diperoleh menjadi lebih luas untuk memahami masalah dan tantangan yang sulit serta hubungan kompleks yang ada di lingkungannya. Melalui pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan budaya organisasi, kepala sekolah diharapkan mempunyai penajaman terhadap nilai, keyakinan serta sikap yang perlu dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan dalam lingkungan belajar.

B. Implementasi membangun Budaya organisasi Perspektif Sosiologis

Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi atau disebut (micro sociology). Sosiologi secara umum adalah suatu ilmu yang membahas,

mempelajari, mengevaluasi, menganalisis, serta mengupas tuntas mengenai masyarakat secara keseluruhan. Dimana, di dalam masyarakat sendiri, terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan, misal: jalinan hubungan sesama manusia yang baik, manusia dan kelompok, kelompok dan kelompok yang hubungan itu bersifat formal ataupun material dan juga statis ataupun dinamis. Sejarah sosiologi pendidikan merupakan pembahasan mengenai awal mula terjadinya atau tergasnya ilmu sosiologi pendidikan dengan beberapa pendapat tokoh yang mendukung. Ilmu sosiologi pendidikan mencakup gejala umum, maka dari itu segala aspek kehidupan manusia dibahas di dalam ilmu sosiologi pendidikan.⁴³

Adapun disini secara makna sosiologi ialah tentang hidup bersama atau ilmu tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Perkataan dini tidak hanya berupa pelajaran dalam suatu masyarakat yang berkrakter mkro tapi disini juga bagaimana suatu tindakan- tindakan dan perilaku-perilaku sosial yang berkrakter mikro. Dengan hal ini dapat berbagai pandangan yang berbeda salah satunya pendapat August Comt yakni kejadian ssial yang diketahui dalam suatu entits lain ataupun dengan memakai cara ilmu yang hasilnya akan dapat dikatakan dengan akurat hasil pnelitian ilmiah. Sehingga pendapat tersebut di jadikan landasan dasar beberapa ahli pengemuka sosiologi.

Sosiologi pendidikan merupakan proses analisis ilmiah atas proses dan berbagai pola sosial yang

⁴³ Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2011), hlm. 196.

terdapat pada sebuah sistem pendidikan. Sosiologi mempunyai alat-alat dan teknik ilmiah untuk mempelajari pendidikan dan dapat berperan untuk memberikan sumbangan berharga kepada sistem pendidikan dalam masyarakat. Selain itu juga dapat menganalisis hubungan dan interaksi manusia dalam pendidikan dengan harapan untuk memperoleh prinsip-prinsip dan generalisasi tentang hubungan manusia pada suatu sistem pendidikan.

Sosiologi memberikan bantuan pada pendidikan dalam wujud sosiologi pendidikan. Dengan demikian ilmu sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan, dasar atau acuan disebut dengan landasan. Jadi landasan sosiologis pendidikan merupakan dasar atau acuan yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologis. Berdasarkan konteks masalah diatas, maka perlu dipetakan ulang, dideskripsikan secara lebih lanjut mengenai bagaimana landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia serta bagaimana pula implikasinya bagi sistem pendidikan.

Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu (pendidik dan peserta didik) bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut

dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Landasan (budaya) pendidikan ini mencakup empat bagian diantaranya:⁴⁴

- a. Landasan (budaya) religious pendidikan, maksudnya memiliki asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan.
- b. Landasan (budaya) filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan.
- c. Landasan (budaya) membangun lingkungan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan.
- d. Landasan (budaya) yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan.

Dengan demikian landasan pendidikan ini memiliki fungsi yang sangat mendasar atas pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Pendekatan sosiologi bisa berangkat dari ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan meliputi; sosiologi untuk guru; sosiologi untuk

⁴⁴ Syatriadin, *Landasan Sosiologis Dalam Pendidikan*, JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017, hlm. 101-102.

sekolah; dan sosiologi untuk mengajar; semua itu akan terkait dengan budaya, baik budaya yang dibangun guru di kelas bersama siswa maupun budaya yang dibangun pimpinan bersama staf. Adapun pembangunan budaya yang berkaitan lembaga pendidikan, akan mengenai: a) Institusi masyarakat sebagai lingkungan organisasi, b) Sosologi dan kurikulum, c) Pendidikan bagi kebudayaan, d) suatu Proses belajar mengajar dalam kelas menurut kacamata sosiologis, e) Guru ataupun dalam masyarakat, f) Sosilogis dalam pembagunan nilai.⁴⁵

Setiap kegiatan pendidikan adalah bagian dari proses menuju tercapainya suatu tujuan dimana setiap tujuan pendidikan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja. Tujuan pendidikan Nasional tercantum dalam Undang-undang pendidikan No.20 Tahun2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional bersifat idealis sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan pendidikan diseluruh Indonesia.

Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalaman. S. Nasution mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Dari beberapa pendapat ini dapat dirumuskan sebuah konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, yaitu: sosiologi pendidikan bertujuan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 102-103.

untuk menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga maupun masyarakat; sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial; sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis status pendidikan dalam masyarakat; sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis partisipasi orang berpendidikan dalam kegiatan sosiologi; dan sosiologi pendidikan bertujuan untuk membantu menemukan tujuan pendidikan.

Menurut FG. Payne, sosiologi pendidikan mempelajari tujuan pendidikan, bahan kurikulum, strategi belajar, sarana belajar, dan sebagainya. Tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan Indonesia modern. Sedangkan tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia adalah: berusaha memahami peranan sosiologi dari pada kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama apabila sekolah ditinjau dari segi kegiatan intelektual; untuk memahami seberapa jauh guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak; untuk mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia di lingkungan pendidikan dan pengajaran; untuk mengadakan integrasi kurikulum pendidikan dengan masyarakat sekitarnya agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis di masyarakat dan negara.⁴⁶

⁴⁶https://www.academia.edu/8523489/Ahmad_Ainul_Chadliq_MAKALAH_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN_DAN_RUANG_LINGKUP_YA, diakses pada 03/07/2021, pukul 10:05 WIB

BAB VI

QUALITY ASSURANCE (QA)

PADA LEMBAGA PENDIDIKAN

PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Banyaknya jumlah sarjana yang tidak ditopang dengan kecakapan akademis dan kematangan kreativitas nonakademis menjadi tantangan bagi tiap-tiap perguruan tinggi. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan kualitas perguruan tinggi akan terus dipersoalkan dalam menciptakan produk-produk, alias dalam melahirkan sarjana. Dengan demikian, persoalan ini penting direspon oleh masing-masing perguruan tinggi agar tergerak menyodorkan jaminan-jaminan yang berkualitas bagi seluruh produknya. Apalagi, di era pesatnya perkembangan teknologi dimana persaingan pasar sangat kompetitif.

Munculnya pasar bebas dan mengemukanya perusahaan multinasional yang memerlukan *skill* khusus bukan saja menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan semakin cepat dan modern. Tetapi sekaligus membutuhkan penyesuaian atas terciptanya kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, unggul, dan kreatif. Pada tataran inilah, lembaga pendidikan perguruan tinggi sekurang-kurangnya harus memberi jaminan agar lulusannya memiliki pemahaman dasar tentang cara untuk bereaksi menghadapi segala bidang kompetisi yang kompleks sebagai upaya bertahan hidup. Melalui jaminan tersebut, perguruan tinggi setidaknya dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai rumah pengetahuan yang menyajikan segala jenis pengetahuan dan keterampilan

sebagaimana yang diharapkan pasar dan dicita-citakan masyarakat.

Sadar atau tidak, perguruan tinggi telah dianggap oleh masyarakat sebagai tangga yang bisa dan dapat memberi jaminan atas lahinya SDM yang berkualitas. Bahkan lebih jauh dari pada itu, perguruan tinggi telah diyakini oleh segenap masyarakat sebagai institusi yang bisa membentengi para pelajar sebuah standar ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi berbasis Iman dan Taqwa (Imtaq) yang sempurna. Lebih-lebih perguruan tinggi yang memiliki embel keislaman maka harus terus berupaya mewujudkan jaminan-jaminan berkualitas guna kelangsungan hidup di dunia bahkan kelangsungan hidup di akhirat. Artinya, perguruan tinggi tidak boleh lengah atas persoalan-persoalan akademik dan non akademik agar kemudian betul-betul mampu menjamin kualitas SDM yang fleksibel di tengah realitas sosial masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu respon terhadap perubahan sosial mensyaratkan dalam penyelenggaraan pendidikan memaksa lembaga pendidikan untuk menerapkan penjaminan mutu atau jaminan kualitas. Oleh karena itu, adanya kebutuhan lain selain SDM juga perlu diperhatikan secara prima oleh lembaga pendidikan apalagi pendidikan merupakan salah satu jenis investasi manusia (*investment in human resources*) atau modal yang ditanamkan meraih kenyamanan hidup yang beradab. Investasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kemampuan, dan sumber daya yang adaptis terhadap perputaran waktu.

Kajian terhadap beberapa aspek indikator termasuk penyelenggaraan mutu dalam pendidikan

menunjukkan bukti empiris bahwa warga negara yang lebih cakap dan profesional sangat membantu dalam menambah kekuatan serta percepatan kemajuan suatu negara. Lembaga pendidikan formal dan nonformal merupakan wadah bagi pengalaman, pengolahan, pelatihan, serta pengembangan mewujudkan keprofesionalan tersebut tentu dengan menggenjot keterampilan dalam memberikan wawasan intelektual dan pemikiran yang ilmiah. Maka karena itu, karya ilmiah ini berusaha untuk mengeksplorasi proses yang terdapat dalam sistem penjaminan mutu tidak hanya menjadi sebuah penanda mutu melainkan juga kualitas lulusan yang dihasilkan yakni lulusan yang kreatif serta dapat mengimplementasikan apa yang diperoleh melalui dukungan yang nyata.

A. Konsep *Quality Assurance* (QA) atau Penjaminan Mutu

Ada kebijakannya kita menengok kembali dunia pendidikan di abad pertengahan agar lebih mudah menelusuri konsep jaminan kualitas, meskipun konsepnya sederhana. Amerika Serikat menggunakan praktik jaminan kualitas sebagai acuan utama untuk inspeksi selama Perang Dunia II sekaligus menjadi amunisi tersendiri dengan standar yang cukup sederhana yakni, dapat membantu dan memastikan bahwa suatu perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Adapun konsep penjaminan mutu dalam pendidikan bermula sejak adanya penjaminan mutu bagi perguruan tinggi tepatnya pada 18 September 1988. Berawal dari konferensi 14 perguruan tinggi di Eropa, yang mengejutkan dunia dari sisi budaya dan tradisi akademiknya. Di dalamnya terjadi dialog

intektual antar kalangan komunitas akademisi di Bologna yang merupakan sebuah kota di Italia.

Sebuah pertemuan yang menghasilkan Bologna Magna Charter University (Piagam Bologna) tentang manajemen modern dan pengaturan manajemen di pendidikan tinggi dan inspirasi untuk konsep sistem penjaminan mutu. Pada saat yang sama, standar pendidikan dirumuskan untuk universitas- universitas Eropa. Di sisi lain, tumbuhnya Piagam Bologna telah menginspirasi sejumlah negara di tingkat regional untuk mengujisistem pendidikan tinggi menggunakan formula seperti sistem penjaminan mutu. Tak lama berselang, kemudian pada tahun yang bersamaan mulai berlaku Konvensi Negara-negara Arab dan Eropa, yang mengadakan pertemuan pada tahun 1978 untuk membahas penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi.. Negara- negara Afrika turut membicarakan konsepsi tersebut pada tahun 1981 hingga kemudian konsep perumasan standar pendidikan juga digencarkan oleh negara-negara se-Asia Pasifik pada tahun 1997.

Quality Assurance atau jaminan mutu ialah sebuah strategi berkelanjutan yang disusun secara objektif, aktual serta sistematis untuk meninjau dan mengukur mutu. Istilah ini dahulu digunakan dalam dunia bisnis komoditas atau jasa yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan masyarakat yang mengindahkan akan mutu. Jaminan mutu ini hendaknya dilakukan guna memberikan kepuasan bagi para pelanggan yang menggunakan suatu produk. Dalam perkembangannya konsep jaminan mutu mengalami perluasan penggunaan yang tidak terbatas di lingkungan bisnis namun juga dapat

digunakan dalam bidang pendidikan sebagai pelayanan jasa.⁴⁷

Jaminan mutu atau *quality assurance* memiliki tujuan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ke dalam Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Tujuan penjaminan mutu pendidikan dalam permendiknas ini meliputi beberapa hal yang sesuai dengan SPMP. *Pertama*, membangun budaya mutu pendidikan yang formal, nonformal dan informal. *Kedua*, adanya pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam setiap penjaminan mutu bagi pendidikan formal dan non formal di satuan program pendidikan, penyelenggara program pendidikan di pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. *Ketiga*, adanya penetapan secara nasional mengenai acuan mutu dalam sistem penjaminan mutu bagi pendidikan formal maupun nonformal. *Keempat*, pembagian secara nasional telah ditetapkan mutu pendidikannya bagi lembaga formal dan nonformal secara rinci sesuai provinsi, kabupaten atau kota, satuan maupun program pendidikan. *Kelima*, melahirkan adanya sistem informasi bagi mutu pendidikan formal dan nonformal yang memiliki basis teknologi informasi yang andal, terpadu serta tersambung antara satuan program pendidikan dengan penyelenggara pendidikan di pemerintah kota atau

⁴⁷ Hermiliah, Wini Dwi Pahlawanti, and Happy Fitria, "Peningkatan Quality Assurance Menuju Pendidikan Berkualitas," *Prosiding, Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, January 10, 2020, 417-18.

kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.⁴⁸

Dengan demikian, secara teoritis, penerapan penjaminan mutu sangat berkontribusi terhadap laju perkembangan sebuah lembaga pendidikan. Sebab, dengan penerapan penjaminan mutu tersebut akan melahirkan lembaga pendidikan yang sama-sama berupaya untuk menunjukkan eksistensi kualitasnya. Sebab pada dasarnya *quality assurance* atau penjaminan mutu memiliki beberapa manfaat yaitu staf memiliki pemahaman mengenai susunan mutu pelayanan yang hendak dicapai, meningkatkan efektifitas pelayanan jasa, mempromosikan dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen pelayanan, dan untuk melindungi terselenggaranya pelayanan jasa hukum. Selain keunggulan tersebut, penjaminan mutu juga memiliki keunggulan selaku pengendali terselenggaranya pendidikan oleh suatu satuan pendidikan guna menyelenggarakan pendidikan berkualitas.

Pada dasarnya penjaminan mutu memegang peranan fundamental pada pembangunan pendidikan berkelanjutan, baik melalui sumber daya manusianya ataupun dari sistemnya, sehingga melalui *quality assurance* dapat dimonitoring serta diukur tingkat kesuksesannya. Manual Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, 2003) mendefinisikan standar mutu sebagai prosedur penetapan dan pemenuhan standar mutu manajemen secara konsisten dan berkesinambungan agar seluruh pihak dari konsumen, produsen, dan yang berkepentingan lainnya mendapatkan kepuasan.

⁴⁸ Hermiliah, Wini Dwi Pahlawanti, and Happy Fitria, 419.

Penjaminan mutu merupakan kewajiban mendasar untuk mewujudkan sistem pendidikan tinggi nasional yang sehat yang bertujuan untuk peningkatan mutu secara berkesinambungan. Secara khusus HELTS tahun 2003 dan 2010 menekankan jika prosedur penjaminan mutu pada pendidikan tinggi harus berupa kegiatan yang otonom, dikelola atas inisiatif mandiri atau internal, dilakukan sesuai dengan tata cara, norma organisasi dan tata tertib di luar institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan.⁴⁹

Terdapat berbagai model pendekatan yang dapat digunakan universitas untuk menetapkan dan mengoperasionalkan penjaminan mutu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengizinkan berbagai pendekatan, antara lain model *Plan, Do, Check, Action* (PDCA), model ISO 9001:2000 atau model Kaizen. Secara teknis, model PDCA sendiri diharapkan mampu melakukan continuous improvement atau kaizen bagi mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tidak perlu membuang-buang waktu dengan sekadar fokus pada kekurangan masing-masing model pendekatan tersebut karena yang jauh lebih fundamental dari semua itu adalah model tersebut menjadi konsep alternatif dalam pengembangan mutu bagi lembaga perguruan tinggi di Indonesia.

⁴⁹ Dirjen Dikti, 2003. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

B. Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Penjaminan mutu di Indonesia diatur dalam PP No. 19/2005 dan yang terbaru PP No. 32/2013 yang menjelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan melalui jalur formal dan nonformal wajib menyelenggarakan (1) Penjaminan Mutu Pendidikan (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, (3) Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan di daerah yang jelas tujuan dan kerangka waktu. Rencana pertanggung jawaban mutu dilakukan melalui proses yang bertahap secara terstruktur dan terencana. Indonesia menggunakan Standar Nasional Pendidikan dalam menetapkan standar mutu pendidikan sehingga dibentuklah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas mengawasi 4.444 lembaga standar pendidikan dan mempelajari pelaksanaan upaya pencapaian mutu pendidikan.

Guna memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan standar mutu pendidikan maka setidaknya BSNP telah telah mengeluarkan dan mengatur delapan standar nasional pendidikan. Standar tersebut merupakan standar minimum untuk sistem pendidikan pada semua yurisdiksi di Negara Indonesia. Adapun standar nasional pendidikan tersebut antara lain: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan pendidikan, dan standar evaluasi pendidikan.

1. Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Sistem penjaminan mutu pada sebuah perguruan tinggi terdiri dari dua komponen, yaitu internal dan eksternal dengan tujuan untuk mempertahankan mutu berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kegiatan internal universitas atau penjaminan mutu (*driven internal*) difokuskan untuk mewujudkan visi dan misi dan memenuhi keinginan stakeholders dengan standar Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) dibagi dua. *Pertama*, adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan standar nasional sebagai tolak ukur standar minimal yang berfungsi di wilayah setempat, meliputi: standar isi; standar kemahiran lulusan; standar proses; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; Standar manajemen; Standar pembiayaan; dan standar evaluasi pendidikan. Hal ini diatur oleh BSNP (Badan Nasional Standar Pendidikan). *Kedua*, standar lain yang perlu diperhatikan ketika diterapkan di bidang pendidikan yakni *International Organization for Standardization (ISO)* yang berlokasi di Jenewa, Swiss. Standar sertifikat ISO dilatarbelakangi oleh model perdagangan bebas yang akan terus dikembangkan.

Standar tersebut meyakini bahwa hanya produk berkualitas tinggi yang akan beredar dan dimanati oleh pasar sehingga konsumen tidak

bingung dengan jumlah produk yang banyak. Di Indonesia, sertifikat ISO lebih dikenal dengan dan SNI (Standar Nasional Indonesia). Beberapa standar ISO yang telah diterapkan antara lain: ISO 9000/SNI 9000 ISO 14000 sebagaimana perguruan tinggi yang telah memperoleh sertifikasi ISO adalah Universitas Widyatama (ISO: 9000:2001) dan Universitas Negeri Yogyakarta. Perguruan tinggi berperan penting dalam mendorong institusi untuk selalu meningkatkan kapasitasnya dengan memperkuat kualitas, relevansi dan daya saingnya. Memperkuat bentuk, dengan tujuan agar dapat menikmati layanan pendidikan tinggi menggunakan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik, serta kesetaraan dan pengembangan akses bagi masyarakat.⁵⁰

2. Faktor yang mempengaruhi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pada pelaksanaan penjaminan mutu di sebuah perguruan tinggi faktor yang mempengaruhinya yaitu:

a. Faktor Internal

Aspek internal yang mempengaruhi kualitas faktor intrinsik perguruan tinggi sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Wissema memaparkan jika faktor intrinsik pendidikan tinggi meliputi beberapa hal: visi, misi dan filosofi; struktur

⁵⁰ Anang Dwi Putransu Asparanawa, *Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi*, AN-NISBAH, Vol. 01, No. 02, April 2015 ж 113.

dan budaya organisasi dan keuangan; Sikap, kualitas siswa dan instrumen seleksi; beberapa untuk staf akademik dan sistem promosi; ketersediaan tanah dan bangunan; dan ketersediaan dana untuk inovasi. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa kualitas pelayanan juga merupakan kunci untuk menjamin kualitas.

Penjaminan mutu ini dapat ditemukan dalam silabus deraja. Sadar atau tidak, kurikulum merupakan aspek terpenting dan paling berpengaruh pada lembaga pendidikan, sebagaimana dikemukakan Agung, ia menyimpulkan jika kurikulum merupakan esensi bidang pendidikan yang berdampak pada semua kegiatan pendidikan.

Menimbang peran fundamental kurikulum bagi pendidikan dan keberlangsungan hidup manusia, maka pembuatan kurikulum tidak dapat dilangsungkan dengan sewenang-wenang.⁵¹ Selain kurikulum, mutu penjamin perguruan tinggi juga didukung dari kualifikasi dosen. Sebab dosen merupakan aspek penting yang dapat menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Kualifikasi dosen yang berkualitas mulai dari tahap penerimaan, pencocokan perbandingan jumlah guru-murid, metode pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan observasi

⁵¹ Leo Agung, 2010. "Tinjauan Kurikulum Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana UNS". Majalah ilmiah IPS. Vol.11.No. 2 September 2010

ilmiah diharapkan dapat menghasilkan siswa berkualitas tinggi. Para alumni harus sanggup bersaing dan menyerap diri di dunia kerja serta menjadi wirausahawan yang kompeten dan profesional.

Selanjutnya, penjaminan mutu di lembaga perguruan tinggi didukung dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Keunggulannya terletak pada promosi pengembangan kelembagaan yang dapat meningkatkan daya guna organisasi, melalui sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menyampaikan informasi terbaru secara cepat kepada masyarakat. Keberlangsungan pengembangan secara berkelanjutan dan kontinu menjadi prinsip utama dari sistem manajemen mutu yang membuat sistem ini diadopsi oleh organisasi yang ada di dunia ini sehingga kemudian diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar suatu organisasi untuk menghindari kemunduran atau kematian. Suatu organisasi tentunya memiliki masa atau umur agar umur organisasi tersebut dapat panjang, maka diperlukan kemampuan untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Ciri utama

pengaruh globalisasi terkait bidang pendidikan adalah adanya peluang dan tantangan kerja yang lebih ekstrim dikarenakan seluruh kinerjanya berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat. Apalagi globalisasi berperan dalam menyiratkan pemahaman keseluruhan dunia.

Kedua yaitu adanya kebijakan pemerintah bagi pendidikan di perguruan tinggi. Pemerintah sebagai pihak eksternal berkeinginan menetapkan parameter dalam berbagai penilaian mutu termasuk pengajaran, peringkat fakultas, dan strategi belajar yang proses penerapannya berfungsi untuk menyelaraskan visi dan misi pendidikan yang bekerjasama dengan pemerintahan. Parameter tersebut sejatinya harus menciptakan, memperkuat desentralisasi dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah tentang desentralisasi; mendorong partisipasi bawah-atas yang lebih luas; menyesuaikan dengan realisasi prinsip-prinsip demokrasi; mengurangi biaya karena mobilitas birokrasi jangka panjang dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi; memberikan peluang pemanfaatan potensi daerah sebaik-baiknya; mengakomodir kepentingan politik; serta mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih berdaya saing.

Ketiga, faktor ekonomi dan industri yang fenomena pertumbuhan serta langkah kebijakannya mendapat peran serta negara

sebagai penyokong. Proses pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bidang industri merupakan konsumen para lulusan yang perannya adalah menentukan eksistensi dan keberhasilan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. Industri digunakan serupa pemangku kepentingan dan dapat memberikan informasi bagi mata kuliah yang sedang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Seperti pendapat biarkan lulusan memasuki dunia kerja.

Keempat, kebutuhan masyarakat dan faktor pengguna alumni. Produk berkualitas perguruan tinggi berupa alumni yang kompeten pada bidang pendidikan tentu banyak diminati dan dicari oleh masyarakat. Para pemakai tenaga alumni atau lulus yang kompeten memiliki impresi besar terhadap tuntutan proses pelaksanaan mutu pendidikan. Bertambah baiknya kualitas pendidikan, akan lebih banyak orang yang mencari ilmunya.

Kelima, perkembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia meliputi: Memasukkan rencana sistem penjaminan mutu dalam agenda Dikti; Komitmen untuk mencapai mutu perlu dimasukkan ke dalam strategi rencana masing-masing universitas; Lulus pada tahun laporan tersebut memuat

penilaian mutu, yang merupakan salah satu mekanisme untuk memajukan akuntabilitas institusi pendidikan tinggi; diperlukan peran aktif guru, mahasiswa dan alumni; dan diperlukan perhimpunan dengan lulusan/alumni perguruan tinggi yang memiliki hubungan tentang kontribusi dan kritik dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti pengalaman lulusan dalam bergabung dengan perusahaan tertentu (Spesifikasi Kepuasan Konsumen).

C. Quality Assurance di Lembaga Pendidikan Perspektif Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan ialah bidang ilmu yang memiliki objek yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai objek ilmu sosial ini dipusatkan perhatiannya untuk mendapatkan pola yang ada di masyarakat itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri yang kuat untuk hidup bersosial sehingga menumbuhkan timbulnya hubungan atau interaksi di dalamnya. Dengan demikian, terdapat hal yang tidak dapat dipisahkan antara manusia sebagai individu dalam sebuah kelompok. Perkembangan sosiologi secara umum seiring dengan perkembangannya telah menjadi sebuah kajian khusus dalam ilmu pendidikan.

Meski lingkupnya masih terbatas, namun kontribusi yang diberikan konsep sosiologi pendidikan telah banyak dan terbukti menyodorkan peningkatan pesat pada sebuah analisis ilmiah dalam sistem sosial pendidikan. E.B Reuter dalam penelitiannya menyampaikan jika sosiologi pendidikan mempunyai

kewajiban dalam menganalisa evolusi lembaga pendidikan serta hubungannya dengan perkembangan manusia. Pembatasan yang terdapat dalam lembaga pendidikan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian di dalamnya.⁵² Sistem penjaminan mutu atau *quality assurance* merupakan strategi berkelanjutan yang tersusun secara objektif dan sistematis untuk memonitor dan memperhitungkan mutu.

Dalam pendidikan, sistem penjaminan mutu ini bertindak sebagai salah satu kuasa meningkatkan mutu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kepuasan bagi masyarakat. Sehingga penerapan sistem penjaminan mutu khususnya pendidikan di perguruan tinggi diharapkan menjadi sebuah langkah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.⁵³

Sistem penjaminan mutu diperguruan tinggi tentu memiliki keterikatan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dimana kualitas pendidikan yang bermutu akan sekaligus mengantarkan pada hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya ikut terbantu dandinamis.

⁵² Dr Zaitun, M.Ag, *Sosiologi Pendidikan (Teori Dan Aplikasinya)* (Pekanbaru:Kreasi Edukasi, 2016), 5–7.

⁵³ Hermiliah, Wini Dwi Pahlawanti, and Happy Fitria, “Peningkatan Quality Assurance Menuju Pendidikan Berkualitas,” 419.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Konstitusi Republik Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dalam pembukaannya menyatakan bahwasanya poin penting dari pendidikan adalah upaya menciptakan kehidupan yang cerdas atau mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bingkai ketuhanan yang esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tidak memandang perbedaan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendidikan, manusia Indonesia diharapkan dapat mengembangkan Indonesia yang bernuansa keimanan, ketakwaan, berbudi pekerti luhur, serta memiliki pengetahuan yang terampil.

Pada dasarnya, proses pendidikan dapat mencetak manusia yang cakap dan mampu mengekspresikan dirinya secara lebih utuh walaupun beragam parameter mutu pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan eskalasi yang signifikan. Dengan demikian, pada prosesnya dalam merealisasikan pendidikan yang bermutu membutuhkan berbagai upaya dan sinergitas antara elemen-elemen pendidikan. Selanjutnya, masing-masing elemen harus fokus pada upaya penyempurnaan seluruh komponen serta kegiatan dalam seluruh dimensi bidang pendidikan.

Bentuk dari sinergitas tersebut tidak cukup dengan pembagian kerja secara teoritis oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan juga perlu adanya pengawasan dan pengendalian. Harapan besar dari pengawasan dan pengendalian itu adalah agar prosedur yang digunakan tertata dengan jelas, strateginya tepat, serta kerjasama dan kolaborasi

yang ada di dalamnya terlaksana dengan berkelanjutan. Terciptanya pendidikan yang berkelanjutan tentu membutuhkan dengan adanya penjaminan mutu pendidikan yang sekaligus menjadi kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh sebuah instansi tertentu dengan memformulasikan terlebih dahulu susunan, rancangan, dan pelaksanaannya.

Hasil akhir dari formulasi tersebut akan memudahkan bagi sebuah instansi pendidikan dalam melakukan beberapa kegiatan bertahap sekaligus tersusun dengan rapi seperti adanya monitoring dan evaluasi. Maka pada tahap inilah proses penjaminan mutu khususnya dalam bidang pendidikan dapat terlaksana dengan teratur. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, terdapat manajemen mutu terpadu atau *Total Quality Management (TQM)* yang menarik diadopsi. Pada mulanya, manajemen ini memang digunakan dalam sebuah perusahaan yang dalam penerapannya terbukti mengalami perbaikan.

Manajemen mutu terpadu ini menjadi sebuah acuan yang cocok digunakan dalam pendidikan karena di dalamnya terdapat kerjasama antar sesama anggota di sebuah kelompok, sifat kepemimpinan yang partisipatif serta adanya proses pemberdayaan bagi individu. Dalam memahami mutu perlu diketahui juga bahwa terdapat gagasan lain yang berkaitan yaitu adanya *Quality Control (QC)*, *Quality Assurance (QA)*, dan *Total Quality Control (TQC)* yang digunakan dalam proses pengawasan dan peningkatan mutu.

Meskipun bermacam cara telah diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik melalui balai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan berbagai sarana dan prasarana, pengadaan media belajar seperti buku dan alat mengajar maupun sebagainya. Faktanya, peningkatan mutu pendidikan belum mampu menunjukkan adanya

perkembangan yang pesat. Tentu kendalanya adalah terletak pada pengawasan dan pengendalian yang kurang optimal.

Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas adanya manajemen mutu terpadu perlu penyelenggaraan dilakukan pengawasan serta pengendalian dalam menggapai mutu pendidikan. Guna mengeksplorasi pengawasan dan pengendalian dalam menggapai mutu pendidikan ini penulis menggunakan perspektif sosiologi pendidikan.

A. Konsep Manajemen Mutu Terpadu

Menurut sejarahnya, manajemen mutu terpadu atau biasa disebut dengan Total Quality Management (TQM) merupakan sebuah manajemen yang berkembang pada bidang manufaktur atau pabrik. Karena hal inilah kemudian Total Quality Management (TQM) tidak sinkron apabila langsung digunakan dalam pendidikan, sehingga manajemen mutu terpadu membutuhkan adanya kreasi serta skenario yang kreatif untuk membantu dalam proses pendidikan. Sutarto menyebutkan bahwa manajemen mutu terpadu yaitu falsafah atau metode yang dapat digunakan untuk membantu sebuah institusi guna mengelola adanya perbaikan perubahan. Selain itu, pada proses pelaksanaannya dapat membantu menentukan agenda atau kegiatan baru yang lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang kian bertambah.⁵⁴

Hal yang menonjol dari manajemen mutu terpadu dibandingkan dengan manajemen yang lainnya yaitu manajemen ini memiliki kepemimpinan yang partisipatif, adanya pemberdayaan individu, serta keterlibatan sebuah tim dalam berkontribusi selama proses produksi atau jasa.

⁵⁴ Sutarto, *Manajemen Mutu Terpadu (MMT-TQM) Teori Dan Penerapan Di Lembaga Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 1–2.

Hal ini gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang semakin bervariasi sehingga melahirkan dan menumbuhkan budaya mutu bagi seluruh pihak yang ada pada sebuah organisasi dengan adanya acuan pada prinsip eskalasi atau peningkatan kualitas yang kontinu atau continuous quality improvement.⁵⁵

Upaya untuk memahami dan menciptakan manajemen mutu perlu mengetahui beberapa gagasan lain mengenai mutu ialah adanya kontrol mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance), dan total quality control atau pengendalian mutu terpadu. Garis besar quality control atau kontrol mutu dipahami sebagai sebuah konsep matang yang melibatkan penciptaan dan eliminasi komponen akibat gagalnya produk karena tidak sinkron dengan standar. Adapun jaminan mutu atau quality assurance merupakan cara untuk mengimplementasi produk yang terhindar dari cacat dan kesalahan, dengan menitikberatkan tanggung jawab pada para tenaga kerja dibandingkan peninjauan pada kontrol mutu. Selanjutnya mengenai pengendalian mutu terpadu sebetulnya adalah ekspansi atau pengembangan dari jaminan mutu yang membahas mengenai kecakapan dalam menciptakan kultur atau budaya mutu dengan cara mengerahkan seluruh staf anggotanya untuk memuaskan para pelanggan.⁵⁶

Mutu terpadu kemudian dipilih menjadi gagasan yang diterapkan dalam bidang pendidikan karena difilosofikan sebagai dasar yang jelas memberi perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus untuk memenuhi

⁵⁵ Sutarto, 3–4.

⁵⁶ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2012), 58–59.

kebutuhan suatu instansi dimasa yang akan datang. Dalam perkembangannya dibidang pendidikan, mutu menjadi suatu konsep yang paten atau dapat dikatakan bahwa mutu dalam pendidikan menggambarkan kebutuhan primer sebuah sekolah untuk dapat sejajar dengan instansi sesamanya.⁵⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mutu menjadi sebuah alat untuk mengukur derajat keunggulan pada pengelolaan proses pendidikan yang secara efektif dan efisien dapat melahirkan siswa yang terampil dan terlatih dalam bidang akademik serta non akademik.

B. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Mutu Pendidikan

Pengawasan merupakan bentuk kegiatan yang terdapat dalam sebuah sistem manajemen berurutan setelah adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.⁵⁸ Dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pengawasan dilakukan oleh para pendidik maupun peserta didik untuk mengetahui pencapaian dari kegiatan yang telah berjalan. Sebuah institusi pendidikan perlu menerapkan pengawasan sebagai sarana untuk menetapkan keabsahan program pendidikannya. Hal ini dilakukan untuk menetapkan adanya langkah-langkah perbaikan apabila dalam kegiatan manajemen terus ditemukan beberapa kondisi yang belum sinkron dengan visi, misi dan tujuan

⁵⁷ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 325

⁵⁸ Amrullah Aziz, "Peningkatan Mutu Pendidikan," *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (Desember 2015): 8.

institusi.

Manajemen mutu terpadu kemudian menjadi salah satu bentuk langkah perbaikan untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan yang diterapkan dalam sebuah institusi pendidikan. Metode yang digunakan dalam quality control adalah inspeksi dan pemeriksaan karena telah diterapkan secara umum dalam pendidikan yang fungsinya untuk memeriksa standar yang telah terpenuhi.⁵⁹ Pengawasan mutu adalah sebuah upaya menjaga dengan harapan setiap aktivitas yang dilakukan dapat memproduksi output atau lulusan yang melengkapi standar pendidikan.

Dengan demikian, quality control berfungsi sebagai evaluasi atau pengawas mutu yang tersusun secara sistematis untuk memajukan, melestarikan serta meningkatkan kualitas yang bertujuan untuk mendeteksi kepuasan dari para pelanggan. Dalam bidang pendidikan, pengawasan mutu digunakan sebagai upaya untuk memperoleh lulusan yang berkualitas. Pengawasan ini menjadi sebuah bagian akhir dari fungsi manajemen oleh karena itu perlu adanya tahap pemantauan, penilaian dan pelaporan serta rancangan dalam perolehan tujuan sebagai ketetapan dalam melakukan tindakan korektif untuk proses penyempurnaan dan perbaikan yang berlanjut.

Artinya, wujud pengimplementasian dari pengawasan mutu pada lembaga pendidikan, dapat ditengarai dari tiga pengawasan. Pertama, pengawasan umpan maju yang bertujuan untuk menduga adanya kemungkinan masalah yang timbul serta bagaimana melakukan strategi pencegahannya. Kedua,

⁵⁹ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, 48.

pengawasan konkuren atau concurrent control adalah memusatkan penanganan pada kegiatan yang tengah berlangsung untuk menegaskan para pelanggan jika proses manajemen berada dalam kondisi yang baik. Ketiga, pengawasan umpan balik atau (feedback control) merupakan proses evaluasi serta koreksi yang dilaksanakan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilangsungkan.⁶⁰

Seorang manajer perlu memahami tentang langkah dalam pengendalian mutu. Sebab pengendalian mutu mempunyai beberapa langkah yang perlu digunakan yaitu PDAC (Plan, Do, Check, and Action) yang mulanya dilansir oleh Edward Deming. Paparan seluruh kegiatan dalam proses pengendalian mutu khususnya mutu pendidikan, mempunyai aspek utama yang dituju yaitu kurikulum atau silabus pembelajaran, pembinaan pada murid serta aspek tata kelola sekolah yang terjalin dengan pengaturan sumber daya dan penyediaan anggaran pendidikan. Dana pendidikan di atas meliputi personil, siswa, sarana dan prasarana, biaya serta kerjasama sekolah beserta masyarakat. Bidang sasaran inilah yang kemudian akan mengacu pada perkembangan potensi siswa secara lebih optimal.⁶¹

Pada prosesnya, pengawasan mutu mempunyai beberapa tahap yaitu pertama, perencanaan yang berisi kegiatan menyusun tujuan yang hendak dicapai dan

⁶⁰ Dalam konsep Heni pengawasan tersebut dimaknai sebagai pengendalian. Heni Nastiti, "Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus Pada PT 'X' Depok)," *JurnalUPN Veteran*, n.d., 416.

⁶¹ Yusra Jamali, "Konsep Pengendalian Mutu Pendidikan," *Tarbawy Jurnal Pendidikan Islam*, n.d., 76-77.

standar performansi guna mengukur sejauh mana performa yang tercapai. Kedua, pengukuran performansi nyata atau mengukur secara akurat setiap performa kegiatan untuk dapat mengetahui perbedaan antara tujuan yang akan dicapai dengan yang diharapkan. Ketiga, melakukan perbandingan performa hasil pengukuran sesuai dengan standar sehingga menghasilkan persamaan dalam pengoperasian mutu.

Keempat, perbaikan, untuk membenahi setiap performa dan situasi yang dihadapi. Pengawasan tersebut oleh Nana Syaodih Sukmadinata disebut juga sebagai pengendalian.⁶²

Dengan adanya pengawasan mutu maka seluruh tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan jaminan mutu yang berkualitas dapat tercapai. Manfaat penerapan penyelenggaraan mutu dalam pendidikan khususnya adalah untuk meningkatkan taraf lulusan atau output dan kualitas para pendidik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan lembaga pendidikan.

2. Penyelenggaraan Pengendalian Mutu Pendidikan

Pengendalian mutu tidak dapat dilakukan oleh individu oleh karena itu kerja sama harus dilakukan agar keberhasilan dapat tercapai. Pendekatan dalam Total Quality Control (TQC) adalah untuk melahirkan rasa percaya diri bagi para karyawan sehingga sebuah organisasi atau perusahaan dapat menemukan kemungkinan adanya kegagalan secara lebih dini, oleh karena itu perlu adanya pembiasaan untuk saling

⁶² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, 1 (Bandung: Refika Aditama, 2006), 46.

terbuka dan membantu antara para pelaksana kegiatan agar tercipta pengendalian mutu yang terpadu.⁶³ Proses pengendalian mutu terpadu dalam pendidikan dapat berupa adanya kegiatan rapat rutin baik bulanan atau tahunan untuk membahas peningkatan dan berbagai macam kendala selama proses kegiatan belajar. Seluruh karyawan dalam institusi pendidikan juga mendapatkan hak untuk terbuka dalam memberikan masukan atau pendapat apabila mengalami kendala selama proses pelaksanaan kegiatan belajar.

Pengertian pengendalian mutu terpadu berkembang menjadi sebuah struktur manajemen yang pelaksanaannya melibatkan seluruh lapisan karyawan melalui penerapan quality control dan metode statistik guna memuaskan para pelanggan beserta karyawan. Oleh karena itu, total quality control dipandang dan diyakini dapat menyodorkan teknik yang efektif dan efisien untuk mengintegrasikan kaidah pengembangan nilai, perawatan serta perbaikan kualitas. Selain itu proses organisasi yang baik dan berkelanjutan diharapkan dapat memajukan produktivitas dan pelayanan ke tingkatan yang lebih ekonomis untuk membangkitkan kepuasan pelanggan. Dasar yang digunakan dalam total quality control yakni mentalitas dengan mengedepankan kualitas kerja.⁶⁴

Dengan pelaksanaan total quality control dapat dirasakan beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya: membangun kemampuan karyawan dalam

⁶³ Evi Yulia, "Analisis Total Quality Control Sebagai Upaya Meminimalisasi Resiko Kerusakan Produk Pada CV Anugrah Jaya Lamongan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi II* (n.d.): 520.

⁶⁴ Evi Yulia, 525.

mengenali persoalan dan menggali alternatif dalam memecahkannya, meningkatkan kapabilitas hubungan dan partisipasi dalam sebuah hubungan kerja, melatih untuk terbiasa berasumsi secara analitik dengan menggunakan sistem quality control, meningkatkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, membantu mengembangkan perusahaan atau organisasi dengan adanya akumulasi gagasan sebagai upaya perbaikan, meningkatkan daya saing barang produksi, dan meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan.⁶⁵

Melalui adanya total quality control harapannya mutu produksi yang dihasilkan mampu meningkat dan menekan tingkat kemerosotan agar mutu dapat terjamin kualitasnya. Jika dalam pendidikan maka produksi yang dihasilkan dapat berupa lulusan atau alumni yang kompeten dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Hal ini dapat terjadi karena para pendidik dan tenaga pendidikan yang ahli dalam berbagai bidang pelajaran memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kreativitas dan pemahaman dalam setiap kegiatan belajar.

C. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Persamaan dan pertautan antara sosiologi dengan ilmu sosial lainnya adalah terletak pada objeknya yakni masyarakat yang mengkaji hubungan antara sesama manusia. Demikian juga dengan manajemen pendidikan, yang di dalamnya juga mengelola manusia dalam organisasi pendidikan. Apalagi dengan asumsi dasar bahwa

⁶⁵ Evi Yulia, 526.

seorang individu merupakan makhluk sosial yang perlu berhubungan timbal-balik dengan individu lainnya karena tidak dapat hidup madir. Sehingga melalui ilmu sosiologi para peneliti paham mengenai reaksi akibat terjadinya interaksi sosial tersebut.

Kaitannya dengan konsep mutu pendidikan, perkembangan mengenai kebutuhan dan penyelenggaraan setiap proses pendidikan mengalami peningkatan yang terukur. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah identifikasi terhadap kualitas mutu yang dihasilkan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan beberapa bidang keahlian yang kiranya masih perlu perbaikan agar lolos kualifikasi dalam dunia kerja. Yusra dalam penelitian ilmiahnya menjelaskan jika ingin melihat mutu pendidikan maka ada tiga perspektif yang perlu diperhatikan diantaranya, perspektif ekonomi, perspektif sosiologi, dan pendidikan. Dalam kacamata ekonomi, maka mutu yang dimaksudkan adalah pendidikan yang memiliki kontribusi berkenaan dengan perkembangan ekonomi. Dalam perspektif sosiologis maka bagaimana manajemen mutu pendidikan bisa memperhatikan dan mengembangkan pelanggan pendidikan.

Pengawasan dan pengendalian manajemen mutu dalam pendidikan, apabila dikaitkan dengan sosiologi pendidikan mempunyai beberapa hal penting yang menyebabkan keduanya memiliki keterkaitan. Pengawasan dan pengendalian manajemen mutu dalam pendidikan digunakan untuk melihat sebuah kualitas pendidikan baik dari input, proses, maupun output yang dihasilkan. Sedangkan sosiologi pendidikan digunakan untuk menganalisa sebuah evolusi pendidikan yang terjadi selama proses manajemen mutu tersebut.

Berdasarkan perspektif sosiologi, dikatakan sebuah pendidikan itu bermutu ketika dapat bermanfaat dalam setiap pengembangan dan kemajuan yang terjadi di masyarakat, misalnya dalam membantu mobilitas sosial, perkembangan kebudayaan, kesejahteraan masyarakat serta pembebasan dari kebodohan. Sedangkan dalam pandangan pendidikan, dilihat dari kemampuan sebuah institusi pendidikan dalam memenuhi setiap kebutuhan warga sekolah termasuk diantaranya kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan, hak peserta didik, serta kepuasan pelanggan dari masyarakat.⁶⁶

Melalui sosiologi pendidikan maka dapat dilihat hubungan dan perkembangan sumber daya yang terjadi di dalamnya, bagaimana sebuah institusi pendidikan menentukan sebuah kepribadian sosial yang kemudian tertanam dalam individu untuk saling membutuhkan satu dengan lainnya.⁶⁷ Sehingga melalui hal tersebut dapat memudahkan sebuah institusi pendidikan dalam meraih visi, misi, dan tujuan pendidikan sesuai dengan yang direncanakan untuk menghasilkan output atau lulusan bermutu tinggi.

⁶⁶ Yusra Jamali, "Konsep Pengendalian Mutu Pendidikan," 305-6.

⁶⁷ Dr Zaitun, M.Ag, *Sosiologi Pendidikan (Teori Dan Aplikasinya)* (Pekanbaru:Kreasi Edukasi, 2016), 7.

BAB VIII

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Dimensi Serta Tahapan Implementasi Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Pendidikan Islam menjadi salah satu muatan pendidikan yang dinilai penting bagi terbentuknya karakter peserta didik, yang mana pendidikan itu bisa terselenggarakan di sekolah berbasis keagamaan yang menjadi salah satu agen untuk mentransfer pengetahuan dan pembelajaran pendidikan Islam. Di sini diperlukan menata ulang dan mengkaji kembali, mengevaluasi tahapan-tahapan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu keberhasilan menjalankannya membutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk menggerakkan madrasah atau lembaga pendidikan Islam dengan bersinergi pada seluruh pihak serta menghindari adanya hubungan yang bersifat tebang pilih. Proses membangun hubungan antar personil sudah seyogyanya mempertimbangkan rasional, humanis, dan *ruhul jihad* apabila berkaitan dengan pemberian komisi bagi setiap prestasi kerja sebagai bentuk penghargaan guna pengembangan lembaga pendidikan di sekolah maupun madrasah.

Meningkatkan sebuah mutu sebuah lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari manajemen yang terorganisir dengan rapi dan tahapan yang matang, hal itu diimplementasikan guna menjadikan aktivitas lembaga pendidikan semakin terarah dan terukur serta

berkesinambungan. Perencanaan yang baik dan matang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang sesuai dengan target yang telah dicanangkan. Terjadinya kegagalan dan keberhasilan suatu program peningkatan mutu tentunya sangat dipengaruhi oleh terbangunnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Maka dengan demikian perlu terus memperhatikan berbagai komponen dan strategi untuk meminimalisir adanya penyimpangan dalam proses pelaksanaannya, serta telah memiliki jalan keluar bagaimana tindakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kegiatan interaksi antara beberapa fungsi manajemen merupakan bentuk upaya koreksi agar sebuah lembaga dapat meraih tujuan sesuai yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dan dinyatakan berhasil ketika dapat memuaskan pelanggan pendidikan pada tahap evaluasi.

B. Prinsip, Komponen Dan Keefektifan Manajemen Mutu Terpadu Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Manajemen Mutu Terpadu bisa menjadikan cara yang dapat memberikan kemudahan bagi banyak praktisi pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan lembaga pendidikan, terutama mereka yang masih stagnan. Manajemen mutu terpadu dapat berupa kegiatan operasional yang digunakan sebagai perantara untuk menciptakan hubungan antara dunia pendidikan, bisnis, dan otoritas yang menyangkut pendidikan. Konsep yang mengantarkan pada implementasi mutu bagi

lembaga pendidikan Islam adalah adanya prinsip-prinsip dan komponen-komponen manajemen mutu yang berperan besar selama proses berlangsung. Sistem pengembangan mutu (berupa prinsip-prinsip dan komponen-komponen mutu) perlu diwujudkan dalam langkah, dan didorong untuk diterapkan sehingga bisa berdampak besar terhadap terwujudnya kualitas pengelolaan lembaga pendidikan.

C. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan” (MMTP) “Pada Lembaga Pendidikan” Perspektif Sosiologi Pendidikan

Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (MMTP), merupakan sebuah proses yang difokuskan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu sebagaimana harapan semua orang tidak hanya para pengelola pendidikan namun juga para orang tua dan masyarakat. Mutu sebuah produk pendidikan dapat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola kecakapan dan potensi yang ada secara optimal mulai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, keuangan serta hubungan timbal balik dengan orang tua dan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam semestinya mampu merombak susunan paradigma baru bagi pendidikan yang berorientasi pada mutu. Seluruh aktivitas interaksi di dalamnya hendaknya senantiasa mengacu pada pencapaian mutu pendidikan. Kerja sama sebuah tim dalam menyelenggarakan proyek perbaikan atau pengembangan mutu pendidikan sebaiknya dilakukan melalui pemberdayaan pegawai dan kelompok kerjanya

dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi dan perannya . Eksistensi kerjasama tim dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan modal istimewa dalam mendekatkan mutu dan kepuasan para stakeholder melalui proses perbaikan mutu secara berkesinambungan.

D. Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Berbudaya mutu dalam organisasi dapat kita ketahui bahwasanya dalam budaya ini diartikan sebagai asumsi, nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercantum berbagai pola pikir. Asumsi dan nilai inilah yang kemudian menggerakkan dan memunculkan perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi dibangun melalui sebuah persepsi atau cara pandang yang sama dari para anggota organisasi. Sehingga budaya organisasi sering disebut dengan sistem bersama. Tercapainya tujuan organisasi tergantung pada adanya kesesuaian antara individu sebagai anggota organisasi dengan budaya organisasinya.

Sosialisasi individu maupun kelompok merupakan salah satu strategi yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan pemahaman nilai-nilai budaya organisasi kepada anggota yang dapat mendukung tercapainya tujuan individu dan tujuan organisasi, termasuk organisasi lembaga pendidikan ataupun sebuah institusi. Proses sosialisasi organisasi bisa dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu: (a) Seleksi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,

termasuk di dalamnya calon peserta didik, dan juga pimpinan puncak dalam sebuah lembaga pendidikan (b) Penempatan dan pemberdayaan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi masing-masing; (c) Pemberdayaan di bidang aktifitas dan kreativitas; (d) Penilaian kinerja SDM, prestasi dan pemberian penghargaan; (e) Penanaman kesetiaan kepada nilai-nilai luhur yang dimiliki organisasi; (f) Memperluas cerita dan berita mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan budaya organisasi; dan (g) Pengakuan atas kinerja dan memberikan promosi.

Disinilah dikondisikan dalam Sosiologi pendidikan ialah analisis praksis ilmiah atas tentang proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem lembaga pendidikan. Teori-teori Sosiologi dalam proses sosial bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan pendidikan, seperti adanya agen dan proses sosialisasi, agen-agen sosialisasi, teori kepribadian perpektif sosiologis dan lain-lain adalah suatu hal yang dapat dimanfaatkan bagi pengelolaan pendidikan di tengah masyarakat. Adapun Menganalisis suatu hubungan dan bagaimana suatu interaksi manusia dalam lembaga pendidikan diharapkan memperoleh kebermaknaan dalam lingkungan mutu tentang hubungan manusia dalam sistem pendidikan yang lebih komprehensif. Dan semua akan bernilai dalam penerapan implementasi manajemen mutu melalui atau dengan membangun budaya mutu.

E. Quality Assurance (QA) Di Lembaga Pendidikan

Sebagai upaya penjaminan mutu, suatu perguruan tinggi dipaksa menghasilkan produk yang berkualitas. Produk berkualitas atau lulusan yang bermutu dari suatu perguruan tinggi akan melahirkan kepercayaan di masyarakat mengenai kualitas sebuah lembaga pendidikan tersebut. Lebih dari itu, lembaga pendidikan yang betul-betul mampu menjamin mutu lulusannya secara otomatis dapat meningkatkan kreativitas masyarakat karena kemampuan Sumber Daya Manusianya sudah terlatih dan unggul sehingga akan mudah mencapai kehidupan yang layak ddi tengah persaingan hidup yang kompetitif ini.

Melalui jaminan mutu dari lembaga pendidikan maka bukan saja kepercayaan masyarakat yang bisa dicapai. Jauh dari pada itu, lembaga pendidikan mampu menyodorkan bukti tentang perkembangan sebuah ilmu pengetahuan dengan melihat lulusan atau alumni yang dihasilkan.

F. Penyelenggaraan Dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Suatu pendidikan dapat disebut pendidikan bermutu dalam perspektif sosiologi apabila dapat menghadirkan kemanfaatan dalam setiap pengembangan serta berkontribusi terhadap kemajuan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Misalnya, seperti kesejahteraan sosial dan pembebasan dari kebodohan. Oleh karena itu, keberlangsungan suatu pendidikan harus ditopang dengan pengawasan dan pengendalian agar lebih mudah dalam mencapai kualitas mutu pendidikan tersebut. Dengan harapan, pendidikan dapat memenuhi

setiap kebutuhan warga sekolah termasuk diantaranya kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan, hak peserta didik, serta kepuasan dari masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian mutu terpadu dalam pendidikan yang bisa menciptakan sebuah kultur atau budaya mutu dengan cara mengerahkan seluruh staf anggotanya untuk memuaskan para pelanggan. Puncaknya, suatu pendidikan bisa dijamin lebih bermutu dan berkualitas apabila terbiasa menciptakan produk yang lolos dari pelanggaran serta memfokuskan tanggung jawab pada setiap sumber daya melalui teknik pengawasan dan kontrol.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk manajemen mutu terpadu yang diimplementasikan pada lembaga pendidikan memiliki tahapan-tahapan yang detail sebagai jaminan pelaksanaan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan. Selain itu juga ada prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang diperhatikan agar efektif penerapannya. Ada rencana penerapan serta pengkondisian budaya mutu yang dibangun serta adanya pengendalian dan pengawasan mutu. Didalamnya berjalan sesuai standar mutu agar terlaksana dalam proses dengan baik. Sehingga pengukuran hasil memiliki indikator-indikator yang jelas guna dilakukannya tahap evaluasi, pengembangan dan perbaikan.

2. Pelaksanaan manajemen terpadu sangat penting dilaksanakan di lembaga pendidikan, sebagai bentuk kontinuitas yang berkesinambungan dalam kontrol dari kualitas penyelenggaraan pendidikan. Implementasi di lapangan memiliki pola “manajemen yang berjalan”. Artinya terkadang pengelola pendidikan yang melaksanakan pendidikan kearah mutu, berjalan seiring tuntutan zaman. Teori-teori mutu terkadang kurang dipahami, sehingga diketahui ada teori mutu, kalau sudah dilaksanakan. Dalam kondisi demikian, maka hal tersebut bisa terjadi bahwa yang dilakukannya di lapangan adalah

sejalan dengan penjaminan mutu yang sudah ditemukan sebelumnya secara teoretis. Oleh karena itu, agar proses pengelolaan ke arah mutu bisa terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan penerapan/implementasi dari teori-teori yang ada.

B. Kata Penutup

Penulis memiliki harapan dan tujuan untuk berandil sebagai tambahan referensi terkait kondisi mutu pendidikan yang berjalan saat ini. Tentunya penulis berharap buku dan penelitian didalamnya dapat bermanfaat dalam perkembangan kehidupan pendidikan pada saat ini. Berbagai perkembangan tuntutan masa juga akan memberikan pengaruh terhadap karya tulis ini, sehingga penulis sangat terbuka atas saran dan masukan, demi berkembang baiknya buku ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. 2010. "Tinjauan Kurikulum Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana UNS". Majalah ilmiah IPS. Vol.11.No. 2 September 2010
- Anang Dwi Putransu Asparanawa, Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi, AN-NISBAH, Quality Assurance Menuju Pendidikan Berkualitas," 419.
- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media, 2009.
- Baharuddin, "Manajemen Pendidikan, Wacana, Proses, dan Aplikasinya di Sekolah" Malang: UM. Malang, 2002.
- CE. Beeby, dalam Yusuf Enoch, "Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan". Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Chairunnisa, Connie, Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chusnul Chotimah, Membangun Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan, Empirisma Vol. 24 No. 2 Juli 2015.
- Dirjen Dikti, 2003. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Dr Zaitun, M.Ag. Sosiologi Pendidikan (Teori Dan Aplikasinya). Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.
- Eny Wahyu Suryanti, Pengembangan Budaya Organisasi Di Sekolah, LIKHITAPRAJNA, Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume 19.
- Farikha, Siti. Manajemen Lembaga Pendidikan. 2015. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).

- Fauzi, Ihwan, "Analysis Of Ptkin Opportunities: Quality Measurement Through The Malcolm Baldrige Criteria For Using The World Class Universty", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 05 No. 01 (2021): 1-13.
- Hasibuan, Malayu . 2005. *Manajemen Sumber Daya Manuaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermanto, Mulyadi. "Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Islam". *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 4 No. 2 2019.
- Hermiliah, Wini Dwi Pahlawanti, and Happy Fitria. "Peningkatan Quality Assurance Menuju Pendidikan Berkualitas." *Prosiding. Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, January 10, 2020.*
- Hikmat, *Manajemaen Pendidikan*, 2011, Bandung: Pustaka Setia. Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, 2009, Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1.
- https://www.academia.edu/8523489/Ahmad_Ainul_Chadliq_MAKALAH_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN_DAN_RUANG_LINGKUPNYA
- Hunowu, Momy A. "Konsep Full Day School Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Irfani*. Vol. 12, No. 1 Juni 2016.
- Jamaluddin, *Manajemen Mutu Teori dan Aplikasi pada Lembaga Pendidikan* Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) MUTU Teori dan Aplikasi pada Lembaga Pendidikan Cetakan I, Jambi Desember 2017.
- Jurman, *Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Sma Negeri 1 Simeulue Timur*, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Februari 2014 VOL. XIV NO. 2.

- Kogan Page Ltd. Third Edition (Adobe eReader Format)
Taylor and Francis e-Library 2005.
- M. Sobry, “Proses Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Mutu Terpadu”, *El-Hikmah (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, Vol. 10. No. 2 Desember 2016.
- M. Sobry, “Proses Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Mutu Terpadu”, *El-Hikmah (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, Vol. 10. No. 2 Desember 2016.
- Mahmud, Marzuki, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Mahmudin, dkk., “Manajemen Mutu Terpadu Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *SEMINAR NASIONAL*. 2018.
- Mardan Umar dan Feiby Ismail, “Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming Dan Joseph Juran)”, *Jurnal Pendidikan Islam Iqra* Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017.
- Mujamil Qomar, “Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam” . Jakarta: Erlangga, 2007.
- Prim Masrokan Mutohar, “Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam” .Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Prim, Masrokan Mutohar, “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam”, *SOSIO RELIGIA*. 2009. Vol. 8, No. 2, Februari 2009.
- R. Schemerhorn John, *Induction to Management*, Asia: Sons (Asia) Pte Ltd, 2010.

- Rosyada, Dede, *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, Depok, Kencana, 2017.
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sallis, Edward, "Total Quality Management In Education" UK.
- Sallis, Edward. 2010. *Manajemen Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Sallis, Edward. *Total Quality Management In Education*, Terjemahan Ahmad Ali RiyadiFahurrozi, Yogyakarta: IRCiSoD,2006.
- Schemerhorn, "Management".New York: John Wiley and Sons Inc., 2002
- Siswanto dan Agus Sucipto, *Teori dan Perilaku Organisasi*, 2008, Malang: UIN-Malang Press.
- Sopiah, *Perilaku Organisasional*, 2008, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial*, 2011, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sowiyah, *Manajemen Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. Juge, *Perilaku Organisasi*, 2008, penerjemah Diana Angelica, Jakarta: Salemba Empat.
- Syaefudin, "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MI Unggulan Ash-Shiddiqiyah 3 Purworejo)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 2 Desember 2018.
- Syatriadin, *Landasan Sosiologis Dalam Pendidikan*, JISIP Vol. 1 No. 2 ISSN 2598-9944 November 2017
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

- Usman, Husaini. 2009. Manajeme Manajemen, Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zahroh, Aminatul, Total Quality Management: Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

GLOSARIUM

A

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb), penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
2. Analisa tugas adalah usaha guru meneliti pengetahuan awal siswa agar mengetahui pelajaran yang telah diketahui dan yang belum diketahui anak.
3. Akademis adalah bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti praktis yang langsung: mengenai (berhubungan dengan) akademi.
4. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu, pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.
5. Alat dan metode adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Assesmen adalah proses pengumpulan data dan dokumentasi belajar dan perkembangan anak.
7. Awal tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.

B

8. Badan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, mamantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
9. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap
10. Belajar kognitif adalah belajar yang bersentuhan dengan masalah mental, dimana objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu bersifat mental.
11. Bulan efektif belajar adalah jumlah bulan kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
12. Buku teks adalah suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu.

C

13. Covid-19 adalah merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti: Middle East Respiratory Syndrome (MERS-

CoV). Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Pneumonia.

14. Ceramah adalah cara belajar atau mengajar yg menekankan pemberitahuan satu arah dr pengajar kpd pelajar (pengajar aktif, pelajar pasif).

D

15. Deduktif adalah metode belajar dan mengajar yg dimulaidr hal-hal yg bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada yang khusus.
16. Desain pembelajaran adalah cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu
17. Dialektika adalah cara memperoleh pengertian tentang suatu hal melalui prosedur ilmiah terhadap suatu gejala yang dilakukan dengan cara tanya jawab.
18. Diskusi adalah cara belajar atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid dengan murid sebagai peserta diskusi.
19. Diskusi induktif metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal- hal yang khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.

E

20. Ensiklopedi adalah kamus besar yang memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi siswa.
21. Evaluasi reflektif adalah evaluasi yang dipergunakan untuk menyebutkancohen (1976). Jenis evaluasi ini

mencoba mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya.

F

22. Faktor dominasi adalah suatu unsur yang dapat mengikat keseluruhan komposisi sehingga dapat mencapai keutuhan dan kejelasan.
23. Faktor keseragaman adalah unsur visual yang hadir berbeda sehingga masalah kejenuhan dapat teratasi.

G

24. Globe (model perbandingan) adalah benda tiruan dari bentuk bumi yang diperkecil.

I

25. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.
26. Indikator adalah suatu konsep dan selakigus ukuran.
27. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan.

K

28. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
29. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa prose

30. interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, pendidik dan lingkungan.
31. Kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.
32. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
33. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
34. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
35. Konstruktivisme adalah landasan berpikir yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas kemudian dikembangkan.
36. Kontekstual adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa.
37. Kriteria : ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu

38. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus.
39. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia.
40. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berisi mata pelajaran yang disesuaikan dengan kepentingan daerah.

M

41. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
42. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.
43. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.
44. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengihtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data atau kejadian.

45. Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar.
46. Media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional.
47. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksi {diingat} kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang asli, dan menyimpan kesan-kesan
48. Model pembelajaran koperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri.
49. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran
50. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.
51. Media pendidikan adalah alat dan bahan yg digunakan di proses pengajaran atau pembelajaran.
52. Materi pembelajaran adalah bahan-bahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan di dalam perkuliahan, praktikum, pembimbingan tugas akhir, dan atau pembimbingan yang bersifat akademik.

53. Media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional.
54. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.
55. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.

O

56. Observasi adalah peninjauan secara cermat; sebelum praktik mengajar, para calon guru.

P

57. Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga)
58. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb).
59. Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; acangan.
60. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

61. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.
62. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertamamasa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah
63. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).
64. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (daily life modeling), sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif - nyaman dan menyenangkan.
65. Penilaian diri adalah keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut.
66. Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

67. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kemauan-kemauan murid untuk menyelesaikan tujuan pendidikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan cocok dengan situasi kelas tertentu.
68. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.
69. Pengajaran Ekspositori adalah pengajaran yang mengutamakan pengungkapan pengetahuan tentang fakta, konsep dan hukum.
70. Penilaian adalah semua upaya membandingkan hasil pengukuran terhadap patokan atau bahan pembanding yang sudah dibakukan dan hasilnya dinyatakan dengan lambang yang menyatakan nilai tertentu.
71. Perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual
72. Penelitian tanya jawab cara belajar atau mengajar yang menekankan pada pemberian pertanyaan oleh pengajar, sedangkan murid harus menjawab pertanyaan tersebut.
73. Papan tulis adalah papan yang digunakan untuk menuliskan pokok-pokok keterangan guru dan menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar.

74. Papan flanel (visual board) adalah suatu papan yang dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu di mana padanya diletakan potongan gambar-gambar atau simbol-simbol lain.
75. Papan magnet (white board atau magnetic board) adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam, sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnet.
76. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ataulembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pedidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan (makro maupun mikro), dan dapat berupa kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran dan atau latihan).
77. Peta timbul adalah peta yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi.
78. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.
79. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan percepatan

80. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
81. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan
82. Pengajaran berprogram adalah salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan media cetak yang memungkinkan siswa belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya serta memperoleh hasil sesuai dengan kemampuannya juga.
83. Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori; pelajaran praktik.
84. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya

R

85. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain.

86. Rangkuman adalah menegaskan kembali prinsip-prinsip penting yang telah dipelajari.
87. Refleksi`adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu.
88. Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) adalah suatu rencana tentang proses pembelajaran untuk satu matakuliah tertentu yang dilaksanakan oleh dosen, yang memuat identitas mata kuliah, deskripsi singkat matakuliah, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, output pembelajaran, outcome pembelajaran, rencana kegiatan belajar mingguan (RKBM), evaluasi pembelajaran, dan pustaka.

S

89. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
90. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
91. Standar Kelulusan adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan untuk mencapai kelulusan.
92. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk

seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.

93. Standar Kompetensi Mata Pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran tertentu.
94. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
95. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Susunan mata pelajaran tersebut terbagi dalam lima kelompok yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan.
96. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan.
97. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

98. Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang hampir atau sudah memenuhi standar nasional pendidikan.
99. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
100. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
101. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
102. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
103. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
104. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

T

105. Tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang.
106. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi
107. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar.
108. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumberbelajar.
109. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik
110. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual
111. Tenaga kependidikan adalah staf non-edukatif di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang tugas dan kewajibannya adalah memberikan layanan akademik

U

112. Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dsb).
113. Ujian adalah hasil menguji; hasil memeriksa, cobaan
114. Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan

V

- 115.1 Variabel adalah sesuatu yang dapat berubah; faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan

W

116. Waktu belajar efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

117. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
118. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum (termasuk hari-hari besar nasional), dan hari libur khusus.

TENTANG PENULIS

Dr. Subiyantoro, M.Ag., lahir di Kulon Progo, 10 April 1959. Pasangan hidup dari Erna Kustriningsih, B.A. serta ayah dari Zahro Varisna Rohmadani, S.Psi, Psikolog; dan Tio Afif Fahrian, ini merupakan Dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri, Kalibawang, Kulon Progo (1971). Kemudian Ia masuk pada PGA Negeri 4 Wates Kulon Progo; Yogyakarta dan berlanjut di PGA Negeri 6 Tahun (1971-1977) pada sekolah yang sama. Selesai dari PGA N, pada th 1980, Ia masuk pada pendidikan Sarjana Muda (Tadris IPS) dan Sarjana Lengkap pada Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (1984-1988). Ketika itu, Ia (Subiyantoro) telah menjadi guru di SMP Kalibawang. Namun ia hanya bertahan selama 3 tahun mengajar di SMP tersebut (1983 - 1985) dan beralih mengajar di MTs Negeri Bantul selama 4 Tahun (1985 – 1989) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Karirnya sebagai guru semakin baik sejak Ia diangkat menjadi Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarpras MAN Kulon Progo periode 1984–1990. Tidak lama kemudian, Ia diangkat menjadi Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum di Sekolah yang sama untuk periode (1991- 2003). Periode ini adalah tugas terpanjang sebagai Wakil Kepala Madrasah karena bertahan hingga 13 tahun. Jabatan baru sebagai Wakil Kepala Madrasah yang begitu panjang memberinya peluang untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana. Ia memilih masuk Program Magister (S2) pada UMS Surakarta dan meraih gelar Master pada 2001.

Karir sebagai Guru dan Wakil Kepala Madrasah tidak membuat Subiyantoro puas. Dengan bekal pendidikan S2

dari UMS, pada tahun 2002 ia melebarkan sayap merambah ke Perguruan Tinggi dengan menjadi Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Wates Kulon Progo. Dunia baru sebagai Dosen tidak membuatnya lalai dari tugas, melainkan semakin kerja keras untuk bisa lebih berkembang.

Pada tahun 2003, karirnya sebagai Guru naik, ketika ia diangkat menjadi Kepala Madrasah pada MTs Negeri Samigaluh Kulon Progo Selama 1,5 tahun (2003-2005). Kemudian pada tahun 2005 ia diangkat menjadi Kepala Madrasah pada MAN Wates I Kulon Progo Periode 2005–2010.

Karir Subiyantoro dari staf pengajar biasa (Guru), kemudian menjadi menjadi Wakil Kepala Madrasah hingga menduduki jabatan Kepala Madrasah, tidak membuatnya merasa aman dan *mapan*, melainkan justru semakin membakar darah juangnya. Hal ini ditandai dengan keberaniannya untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan konsentrasi Ilmu Pendidikan pada tahun 2006. Pada waktu itu masih sangat jarang seorang Guru/Kepala Sekolah mengambil studi S3, bahkan nyaris tidak ada.

Di sela-sela kesibukan kuliah Doktor, kinerjanya sebagai Kepala Madrasah tidak tersendat, tetapi justru semakin meningkat. Meningkatnya kinerja sebagai Kepala Madrasah ditandai dengan dipindah tugaskan untuk yang ke tiga kalinya, menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri di kota/ibu kota Provinsi, yakni pada MAN Yogyakarta II periode 2010–2012. Pada waktu yang bersamaan, (2010), dengan bimbingan/ promotor **Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro** dan **Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.**, Subiyantoro lulus studi S3 dan berhasil meraih gelar Doktor (**Dr. Subiyantoro, M.Ag**)

dengan predikat *Cumlaude* dengan nilai tertinggi, sehingga ditunjuk mewakili wisudawan (S1, S2 dan S3) UNY pada tahun 2010 . Sejak itulah Ia mutasi dari Guru ke Dosen; yakni dari Kepala MAN Yogyakarta II ke Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012.

Selain mengajar di S1 MPI, juga mengajar S2 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Surakarta (Waktu itu), Ia (Subiyantoro) juga pernah diamanati sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Selain sebagai Dosen, amanat yang juga diemban berikutnya adalah sebagai Penjamin Sistem Mutu Prodi (PSMP); dan hingga tahun ini Ia bertugas sebagai Dosen pada Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Diterbitkan oleh :

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Tlp. 0274 – 513056

Fax: 0274 – 519732

Email: <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/>